

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SULAWESI SELATAN**

**MUSLAEDI**

**A011181018**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SULAWESI SELATAN**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :

**MUSLAEDI**

**A011181018**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

MUSLAEDI  
A011181018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 September 2022

Pembimbing I

Fitriwati Djam'an, SE., M.Si.  
NIP : 198008212 00501 2 002

pembimbing II

Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si.  
NIP : 19880113 201504 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP: 19740715200212 1 003

## SKRIPSI

### ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SULAWESI SELATAN





Disusun dan diajukan oleh :

MUSLAEDI  
A011181018

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 13 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fitriwati Djam'an, SE., M. Si	Ketua	1. 
2	Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M. Si	Sekretaris	2. 
3	Drs. A. Baso Siswadharna, M. Si.	Anggota	3. 
4	Mirzalina Zaenal, SE., M. S.E	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715200212 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muslaedi

Nomor Pokok : A0111813018

Program Studi : Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Hasanuddin

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang dipergunakan dengan cara melanggar Hak Cipta Pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Muslaedi

# PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan**” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuatkan bukan hanya sebagai pemenuhan persyaratan bagi penulis guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis mengharapkan masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambarkan dalam bentuk skripsi sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi Mahasiswa Ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik bagi para pembaca. Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan banyak pembelajaran terkait masalah yang diteliti serta membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang mendidik.

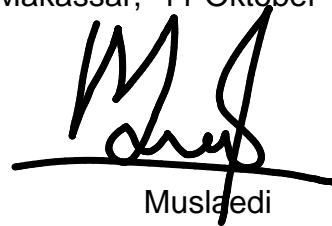
Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut :

1. Allah SWT. Atas kehendak dan karunia-Nya memberikan kemudahan serta kelancaran pada setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Orang tua penulis yaitu bapak Syamsuddin dan ibu Mari beserta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan support atau dukungan selama masa perkuliahan dari awal sampai akhir perkuliahan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
3. Ibu Fitriwati Djam'an, SE., M. Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M. Si. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat yang diberikan kepada peneliti.
4. Bapak Drs. A. Baso Siswadharna, M. Si. selaku dosen penguji I dan Ibu Mirzalina Zaenal, SE., M. S.E selaku dosen penguji ke II yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan serta terima kasih atas segala saran perbaikan dan pertanyaan-pertanyaan serta kritik yang membangun selama seminar proposal dan ujian skripsi dari hal-hal tersebut penulis banyak memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis yaitu ILMU EKONOMI 2018 (KAWAN IE 2018), terima kasih atas setiap momen kebersamaan selama perkuliahan yang terjalin baik suka maupun duka.
6. Teman kuliah yaitu agung, farid, reski fausan, aksa, musmuliadi, syahrul nirmala dan ani terima kasih penulis ucapkan untuk kalian yang selalu menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik, terima kasih telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi semoga kalian sehat selalu.
7. Kepada keluarga kakak ipar saipul s.pd, ardianto somba, SH. Dan juga terima kasih kepada sodara kandung nur ina, SE. dan

ismawati, SH. terimakasih telah mendengar keluh kesah penulis, terimakasih atas segala bantuan, doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis terutama sejak penulisan skripsi.

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Makassar, 11 Oktober 2022



Muslaedi



# **ABSTRAK**

## **ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SULAWESI SELATAN**

**Muslaedi**

**Fitriwati djam'an**

**Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi secara simultan dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2010 sampai dengan 2019. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Y1), dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y2) variabel independen yang digunakan adalah Kredit Umum (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kredit Umum secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UMKM dan secara tidak langsung Kredit Umum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UMKM melalui PDRB berpengaruh negative dan signifikan. Variabel Pengeluaran Pemerintah secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan dan secara tidak langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui PDRB berpengaruh positif dan signifikan.

**Kata Kunci :** Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja UMKM, PDRB

# **ABSTRACT**

## **DETERMINANT ANALYSIS OF LABOR ABSORPTION IN SMALL AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES (MSMEs) IN SOUTH SULAWESI**

**Muslaedi**

**Fitriwati djam'an**

**Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus**

This study aims to examine and analyze the Determinants of Labor Absorption in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in South Sulawesi. The analytical method used in this research is simultaneous regression analysis using secondary data. The data collection in this study is through the Central Statistics Agency (BPS) in 2010 to 2019. The dependent variable used in this study is Gross Regional Domestic Product (PDRB) (Y1), and Labor Absorption (Y2) the independent variable used are General Credit (X1) and Government Expenditure (X2). The results of the study indicate that the General Credit variable directly has a positive and significant effect on MSME Workforce Absorption and indirectly General Credit on MSME Workforce Absorption through PDRB has a negative and significant effect. Government Expenditure variable directly has a positive and insignificant effect and indirectly Government Expenditure on Labor Absorption through GRDP has a positive and significant effect.

Keywords: General Credit, Government Expenditure, Employment of UMKM,  
PDRB

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	11
2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja .....	12
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.4 Kredit Umum .....	14
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah.....	15
2.2 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Dan penyerapan tenaga Kerja.....	15
2.3 Keterkaitan Antara Kredit Umum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja .....	16

2.4 Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja .....	17
2.5 Penelitian Terdahulu .....	18
2.6 Kerangka Konseptual Penelitian .....	19
2.7 Hipotesis .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Teknik Pengumpulan Data: Jenis dan Sumber Data.....	23
3.2 Metode Analisis Data .....	23
3.3 Definisi Operasional .....	25
3.3.1 Variabel Independen .....	25
3.3.2 Variabel Dependen.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
4.1 Gambaran Umum Struktur Ekonomi 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	26
4.1.1 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Selayar	26
4.1.2 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bulukumba.....	27
4.1.3 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bantaeng .....	27
4.1.4 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Jeneponto .....	28
4.1.5 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Takalar.....	28
4.1.6 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Gowa .....	29
4.1.7 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Sinjai .....	30
4.1.8 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Maros.....	30

4.1.9	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Pangkep .....	31
4.1.10	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Barru ..	31
4.1.11	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bone .....	32
4.1.12	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Soppeng .....	33
4.1.13	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Wajo .....	34
4.1.14	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Sidrap .....	34
4.1.15	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Pinrang .....	35
4.1.16	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Enrekang .....	36
4.1.17	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu .....	36
4.1.18	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Tanah Toraja .....	37
4.1.19	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Utara.....	37
4.1.20	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Timur .....	38
4.1.21	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Toraja Utara.....	38
4.1.22	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Makassar....	39
4.1.23	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Pare-Pare...	40
4.1.24	Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Palopo.....	40
4.2	Perkembangan Variabel Penelitian.....	41
4.2.1	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan .....	41

4.2.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.....	42
4.2.3 Perkembangan Kredit umum 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan .....	44
4.2.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan .....	45
4.3 Hasil Estimasi Pengaruh Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah, Terhadap PDRB, dan Penyerapan Tenaga Kerja. ....	47
4.3.1 Pengaruh Kredit Umum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui PDRB .....	50
4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui PDRB. ....	53
4.3.3 Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ...	55
<b>BAB V_KESIMPULAN .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Data Jumlah Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2019.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 1.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 4.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja sektor UMKM 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam jiwa) .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam triliun rupiah).....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 4.3 Perkembangan Kredit Umum 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam milyar rupiah)....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam triliun rupiah).....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4.6 Hasil Estimasi Fungsi PDRB (Y1), Fungsi Penyerapan Tenaga Kerja (Y2).....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir penelitian.....	23
Gambar 4.1 Hasil Estimasi.....	51



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memiliki kriteria sebagai usaha mikro. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sesuai pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mampu menjadi fondasi usaha kerakyatan yang memiliki potensi untuk diterapkan pada masa kini dan memiliki fungsi untuk menyeimbangkan dampak ekonomi global pada masyarakat. Perlu diketahui bahwa UMKM merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, penyerapan tenaga kerja dan dekat dengan rakyat kecil (Handayani, 2017). Terutama, masalah ketenagakerjaan sudah menjadi bagian integral dari masalah ekonomi, sehingga pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari masalah pembangunan ekonomi (Fatih, 2017).

Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu sentra andalan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan seperti kakao, kopi, lada, padi, dan jagung. Berbagai upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengembangkan UMKM di Sulawesi Selatan diantaranya memberikan fasilitas peningkatan kualitas kemasan produk UMKM, sertifikasi produk pangan industri rumah tangga, pendaftaran produk UMKM, dan melaksanakan pelatihan vokasi untuk pengembangan UMKM. Sementara itu, kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses UMKM terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi, dan pasar.

Berdasarkan hasil data survei IMK tahun 2019 jumlah UMKM yang diunggulkan di Sulawesi selatan tercatat 923.035 unit diantaranya industri makanan dengan presentase usaha sebanyak 41,24 persen, industri pakaian jadi dengan presentase usaha sebanyak 11,84 persen, dan industri tekstil dengan presentase usaha sebanyak 11,65. Dari hasil survei dapat dikatakan bahwa UMKM perlu didorong untuk lebih di tingkatkan untuk menyerap tenaga

kerja yang lebih banyak lagi dan mengurangi jumlah pengangguran yang semakin bertambah setiap tahunnya khususnya di Sulawesi Selatan.

Secara umum tantangan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal, serta kebijakan dan peraturan yang kurang efektif. Tantangan SDM UMKM pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UMKM yang masih banyak difokuskan pada produksi, bukan permintaan pasar.

Tantangan berat dalam pengembangan UMKM dalam era perdagangan bebas dan persaingan global saat ini adalah persaingan bisnis yang semakin ketat. Ketatnya kompetisi di dunia usaha juga dirasakan oleh UMKM batik di tanah air. Tentunya intensitas kompetisi dalam industri ini, mewajibkan UMKM di tanah air untuk memiliki keunggulan produk dan kekhasan dari produk yang dihasilkan yang berkelanjutan agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis menumbuhkan tingkat pembangunan nasional. UMKM dan ekonomi kreatif dapat mendukung penyerapan tenaga kerja khususnya perempuan. Produk UMKM juga telah terbukti meningkatkan potensi budaya dan pariwisata Indonesia, sehingga turut menjaga kelestarian citra budaya daerah. disamping itu, di tengah gejolak ekonomi global, sektor UMKM dan produk kreatif juga relatif memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, UMKM diyakini dapat menjadi salah satu sektor penopang stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan (Todaro 2003). Secara umum, penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja berbeda dari satu sektor dengan sektor lainnya (Sumarsono, 2003).

Penyerapan tenaga kerja merupakan penduduk yang mampu bekerja dalam usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari orang yang mencari kerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. (Kuncoro, 2012).

Sedangkan Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan merupakan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam usaha tertentu. Namun kemampuan penyerapan akan berbeda satu unit usaha dengan usaha lainnya karena kemampuan unit usaha yang berbeda-beda (Indayati, 2010 dkk).

Pembangunan ekonomi di negara berkembang, semakin bertambahnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Dalam kondisi saat sekarang, di negara berkembang kondisi pembangunan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih cepat dari total jumlah penduduk. Oleh karena itu, kondisi ini merupakan masalah cukup serius yang kita hadapi mengenai penyerapan tenaga kerja yang dimana pada akhirnya terjadi peningkatan pengangguran (Sukirno, 2013).

Dalam konsep Okun Law yang memberikan penjelasan hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran. Tujuan dari Okun Law adalah dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menekan tingginya tingkat pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia untuk jangka panjang.

Penerapan Hukum Okun Law terhadap Indonesia dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Peningkatan output atau pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai alat kebijakan dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran. Hukum Okun Law dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target tingkat pengangguran. Penciptaan lapangan kerja atau berkurangnya tingkat pengangguran merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia saat ini.

Tabel 1.1 Data Jumlah Tenaga Kerja UMKM dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Sulawesi Selatan Tahun 2010 - 2019

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja UMKM (Orang)	Perubahan Jumlah Tenaga Kerja UMKM (Persen)	PDRB (Triliun Rupiah)	Perubahan Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2010	180,849	5,04	17,173,772	6,03
2011	220,180	17.86	18,668,589	8.01
2012	223,282	1.39	19,323,945	3.39
2013	243,053	8.13	21,782,056	11.29
2014	320,390	24.14	23,408,790	6.95
2015	245,464	-30.52	25,172,407	7.01
2016	253,922	3.33	27,061,467	6.98
2017	263,850	3.76	28,946,989	6.51
2018	208,257	-26.69	30,454,533	4.95
20 19	263,817	21.06	33,202,737	8.28

Sumber : Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan

Berdasarkan data dari tabel 1.1 tercatat di Tahun 2017-2018 terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja UMKM yang sangat tinggi hingga mencapai -26,69 persen disisi lain diiringi juga dengan penurunan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi 4,95 persen hingga pada Tahun 2019 jumlah tenaga kerja UMKM sudah terjadi peningkatan sebesar 21,06 persen akan tetapi peningkatan masih belum stabil karena masih ada selisih tenaga kerja yang belum terserap ke dunia kerja pada Tahun 2018 yang lalu. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami penurunan sebesar 8,28 persen sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kembali pada tahun yang akan datang.

Masalah yang muncul pada tabel 1.1 yaitu terjadi pada Tahun 2018 yang lalu dimana menurut data jumlah tenaga kerja UMKM yang terserap di Sulawesi Selatan hingga mencapai -26,69 persen yang diakibatkan Sulawesi Selatan mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor jasa yang minim menyerap tenaga kerja disektor UMKM, sehingga jika pertumbuhan ekonomi mengalami

penurunan maka akan berdampak semakin bertambahnya tingkat pengangguran karena banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja. Bertambahnya tingkat pengangguran disebabkan adanya kesenjangan antara permintaan tenaga kerja dengan lapangan kerja, ditambah minimnya informasi lapangan kerja. Ada beberapa faktor pemicu pengangguran diantaranya dampak kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kenaikan UMK menekan pelaku industri yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, pengangguran juga disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan.

Hingga pada Tahun 2019 jumlah tenaga kerja UMKM sudah terjadi peningkatan sebesar 21,06 persen akan tetapi peningkatan jumlah tenaga kerja UMKM ini masih belum stabil karena masih ada selisih tenaga kerja yang belum terserap ke dunia kerja pada Tahun 2018 yang lalu. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami penurunan sebesar 8,28 persen sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kembali pada tahun yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja mempunyai berpengaruh positif karena di Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun jumlah tenaga kerja malah mengalami fluktuasi.

Peningkatan jumlah tenaga kerja menjadi kontribusi naiknya pertumbuhan ekonomi. ketika pertumbuhan ekonomi naik maka jumlah tenaga kerja yang terserap ke usaha mikro kecil dan menengah juga naik. Akan tetapi tenaga kerja yang belum mampu memenuhi angkatan kerja berdampak pada penambahan jumlah pengangguran salah satu faktor yang mempengaruhi tenaga kerja yang menurun adalah disebabkan oleh rendahnya produktifitas dari para pekerja. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak (Putri, 2018).

Tabel 1.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Sulawesi Selatan Tahun 2010 - 2019

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri (Orang)	Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri (Persen)
2010	35.692	-21.45
2011	38.838	8.10
2012	56.436	31.18
2013	56.986	0.97
2014	57.450	0.81
2015	49.346	-16.42
2016	57.245	13.80
2017	45.737	-25.16
2018	47.241	3.18
2019	40.232	-17.42

Sumber : Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan

Berdasarkan data dari tabel 1.2 tercatat di Tahun 2010, 2015, 2017, dan 2019 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja UMKM yang sangat tinggi. Jumlah tenaga kerja sektor industri sudah terjadi peningkatan pada tahun 2013 sebesar 31,18 persen akan tetapi hanya terjadi pada tahun 2013. Peningkatan masih belum stabil karena masih banyak tenaga kerja yang belum terserap ke dunia kerja pada sektor industri. yang diakibatkan Sulawesi Selatan mengandalkan sektor jasa yang minim menyerap tenaga kerja disektor industri, sehingga semakin bertambahnya tingkat pengangguran disebabkan adanya kesenjangan antara permintaan tenaga kerja dengan lapangan kerja, ditambah minimnya informasi lapangan kerja.

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dengan membandingkan jumlah tenaga kerja UMKM dan jumlah tenaga kerja sektro industri di Sulawesi Sselatan pada tahun 2010-2019 dapat di ketahui bahwa yang banyak menyerap tenaga kerja berdasarkan pada data adalah tenaga kerja umkm di bandingkan dengan sektor industri yang di akibatkan pada sektor industri jumlah usaha yang tidak banyak sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja kemudian pada sektor industri

perekrutan karyawan selalu mengandalkan keterampilan atau, latar belakang pendidikan sehingga sektor industri tidak banyak menyerap tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Berbeda dengan UMKM yang terfokus untuk lebih mengutamakan masyarakat golongan kebawah dimana dengan semakin banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak menyerap tenaga kerja dan juga umkm tidak terlalu mengandalkan keterampilan dan latar belakang pendidikan sehingga UMKM butuh perhatian yang lebih oleh pemerintah untuk lebih dikembangkan lagi kedepannya untuk membantu masyarakat golongan kebawah untuk mendapatkan pekerjaan khususnya di Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu dihindari agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan di tempat atau mengalami kemunduran. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu seperti; modal (investasi dan pengeluaran pemerintah), tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan peran strategis yaitu berupa pembentukan modal. Pembentukan stok modal inilah yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan di sejumlah pasar keuangan. Modal ini yang akan membantu proses produksi, sehingga akan menghasilkan barang dan jasa yang tentunya dapat digunakan oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya. Investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan khususnya pada sektor UMKM. Banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Modal bagi UMKM menjadi penting, sebab seringkali mendapatkan peluang usaha yang cukup besar. Namun, kondisi permodalan yang minim membuat UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi. Akses ke sumber permodalan membutuhkan jaminan, aspek legalitas, pencatatan

keuangan yang rapi dan rencana bisnis yang profesional, membuat pelaku UMKM yang umumnya berpendidikan rendah kesulitan dalam memenuhinya, sehingga peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam memberikan kemudahan pada akses kredit dan pendampingan usaha sangat di perlukan. Oleh karena itu perlu adanya upaya mengatasi masalah UMKM dalam pemenuhan modal. Salah satunya pemerintah mulai mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Tahun 2007 sebagai respon atas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 agar penyaluran kredit dapat merata. Program KUR ini ditujukan bagi kelompok-kelompok UMKM di Indonesia. Objek-objek yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan pembiayaan Kredit Mikro yang diberikan kepada para pelaku UMKM yang berada di Indonesia pada sektor ekonomi untuk lebih mengembangkan usaha-usahanya, yang diharapkan setelah UMKM mengalami peningkatan maka akan berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya pada sektor UMKM yang akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa peningkatan dalam penyaluran kredit berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian-penelitian dalam beberapa tahun terakhir menemukan bahwa peningkatan pada pertumbuhan ekonomi kredit produktif yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Bezemer, 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat memerlukan tenaga kerja tambahan sebagai faktor produksi untuk memenuhi permintaan agregat yang meningkat. Kondisi seperti ini terutama akan terjadi pada struktur perekonomian yang memiliki corak padat karya (*Labour Intensive*). Apabila struktur perekonomian suatu wilayah adalah padat modal (*Capital Intensive*), maka pertumbuhan ekonomi hanya akan meningkatkan kebutuhan modal dan tidak akan menyerap banyak tenaga kerja (Maulia, 2014)

Daya serap tenaga kerja merupakan suatu model permintaan suatu unit usaha terhadap tenaga kerja dalam pasar kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah yang berlaku. Tingkat upah yang berlaku ini juga mempengaruhi kekuatan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja dari pasar. Kekuatan terhadap permintaan tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal dari usaha tersebut (Chusnah, 2013).

Semakin sempit daya serap sektor moderen terhadap perluasan kesempatan kerja telah menyebabkan sektor tradisional menjadi tempat



penampungan angkatan kerja. Lapangan kerja terbesar yang dimiliki Indonesia berada pada sektor informal. Hal ini disebabkan sektor informal mudah dimasuki oleh para pekerja karena tidak banyak memerlukan modal, kepandaian, dan keterampilan (Chusnah, 2013).

Analisis penyerapan pekerja di sektor industri dapat didekati melalui teori permintaan tenaga kerja. (*Derived Demand*) dari perubahan permintaan konsumen terhadap output perusahaan. Perusahaan menyewa tenaga kerja bukan untuk dikonsumsi langsung, tetapi digunakan untuk memproduksi, maka penambahan kemampuan pengusaha menyerap tenaga kerja tergantung dari penambahan permintaan terhadap barang yang diproduksinya (Simanjuntak, 1985).

Sebagai negara berkembang, pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi salah satunya yaitu melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum.

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian (Djunasien dan Hidayat, 2002). Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah

yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (Alkadri 2009).

Untuk menanggulangi masalah penyerapan tenaga kerja harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional. Program yang dipilih harus berpihak kepada pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta diiringi semakin meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Salah satu penguatan pertumbuhan ekonomi yaitu pemerintah perlu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana para pelaku UMKM dimudahkan untuk mengambil kredit yang berguna untuk pengembangan usaha-usahanya.

Dengan adanya langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung untuk pengembangan UMKM yang berguna memperluas akses masyarakat miskin untuk memasuki pasar kerja, menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang ada, maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kredit umum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kredit umum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisis determinan penyerapan tenaga kerja pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Membantu memberikan informasi bagi peneliti lain yang masih ada hubungannya dengan permasalahan ini.
  - b. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan masalah-masalah penyerapan tenaga kerja
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah dan strategi-strategi untuk mengembangkan lebih lanjut lagi pada sektor industri kecil dalam hal ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM). Umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap (Tulus Tambunan, 2012)

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000,-.

Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan maksimal Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan maksimal Rp 2.500.000.000,-.

Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan maksimal Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki

hasil penjualan tahunan dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan maksimal Rp 50.000.000.000,-.

Usaha mikro dan kecil menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dapat dikatakan UMKM memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Pada perekonomian nasional dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai PDB, Salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah.

Adapun tujuan lain yaitu pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan Kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi sistem usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### **2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja**

Penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan. Secara umum, penyerapan tenaga kerja menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. (Todaro, 2003).

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar diberbagai sektor perekonomian. Penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja atau di pekerjakan oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). (Kuncoro, 2002).

Penyerapan tenaga kerja merupakan penduduk yang mampu bekerja dalam usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari orang yang mencari kerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. (Kuncoro, 2012). Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan merupakan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam usaha tertentu. Namun kemampuan penyerapan akan berbeda satu unit usaha dengan usaha lainnya karena kemampuan unit usaha yang berbeda-beda (Indayati, 2010).

Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, semakin bertambahnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Dalam kondisi saat sekarang, di negara berkembang kondisi pembangunan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih cepat dari total jumlah penduduk. Oleh karena itu, kondisi ini merupakan masalah cukup serius yang kita hadapi mengenai penyerapan tenaga kerja yang dimana pada akhirnya terjadi peningkatan pengangguran (Sukirno, 2013).

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Adapun perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya, dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Basri, 2010).

Fenomena pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti, karena ada negara atau wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat penganggurannya juga tinggi.

Keadaan tersebut menjadi pemicu munculnya Hukum Okun yang diteliti oleh Arthur Melvin Okun dalam Okun's Law. Hukum Okun menggambarkan, hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi adalah berbanding terbalik (negative), semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan (Mayra Astari, 2019).

Dalam konsep Okun Law yang memberikan penjelasan hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran. Tujuan dari Okun Law adalah dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menekan tingginya tingkat pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia untuk jangka panjang.

#### **2.1.4 Kredit Umum**

Pengertian kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Kasmir 2016).

kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit (Ismail. 2010).

Secara umum kredit dapat dilihat dari segi kegunaan biasa digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin dengan masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama. Kemudian dapat juga di gunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kemudian dapat juga digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi atau bisa juga disebut kredit produktif. Kredit ini diberikan untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian

akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

### **2.1.5 Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2002).

Pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa (Sukirno, 2010).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan, pengeluaran pemerintah bersifat (*Exhaustive*) yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Disamping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai atau mungkin pula kepada negara-negara sebagai hadiah (Suparmoko, 2004).

## **2.2 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Dan penyerapan tenaga Kerja**

Fenomena pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti, karena ada negara atau wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat penganggurannya juga tinggi. Keadaan tersebut menjadi pemicu munculnya Hukum Okun yang diteliti oleh Arthur Melvin Okun dalam Okun's Law. Hukum Okun menggambarkan, hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi adalah berbanding terbalik (*negative*), semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan (Mayra Astari, 2019).

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut



ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2008). Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak (Adinda Putri Haspari, 2018).

Keterkaitan antara Pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetapi sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di antara masyarakat dan distribusi pendapatan serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti merupakan syarat perlu bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia. Dengan perkataan lain, yang diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam arti berpihak kepada tenaga kerja (Suparta, 2014).

### **2.3 Keterkaitan Antara Kredit Umum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja**

Kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat diartikan bahwa jika kredit konsumsi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang mengatakan bahwa kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kredit konsumsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dikarenakan penyaluran kredit ini bertujuan untuk konsumtif, kredit konsumsi ini ditujukan untuk individu atau perorangan dan kelompok bukan untuk kegiatan usaha tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang konsumtif. Kredit konsumsi setiap tahun mengalami peningkatan terutama digunakan oleh masyarakat untuk kredit rumah/apartemen dan kredit kendaraan bermotor (khairuna 2018).

berdasarkan hasil penelitian Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kredit perbankan sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jambi. Penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kredit perbankan sektor industri sebesar 84,2% di

Provinsi Jambi pada tahun 2006-2015. Usaha mencapai tujuan pembangunan khususnya pembangunan bidang ekonomi, perbankan memegang peranan yang sangat penting menjadi suatu badan yang dapat menunjang pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pengambilan kredit yang berguna untuk menambah alat-alat produksi yang berguna untuk meningkatkan usaha perusahaan maka perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja salah satunya adalah sektor industri. Pembangunan pada sektor industri merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju. Industrialisasi memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, perluasan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja sebagai langkah agar terpenuhinya tujuan nasional yaitu kemakmuran rakyat (Hasan Basri 2018).

#### **2.4 Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja.**

Menurut Djunasien dan Hidayat, (2002) Pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi hasil penelitian menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang mengatakan pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian. Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang salah satunya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output dalam jangka panjang.

Menurut Rosen, (2014); Sukirno, (2013) pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui melalui instrumen anggaran. Pengeluaran

pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Galang Kanigara Jagaditha dan Gusti Wayan Murjana (2020) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali 2015-2019. Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan langsung maupun tidak langsung dalam mengatur jalannya perekonomian. Melalui pengeluaran pemerintah maka output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi akan semakin besar. Disamping itu pula, pengeluaran pemerintah yang dialokasikan akan mendorong produsen untuk meningkatkan output produksinya. Dalam meningkatkan output produksi, produsen akan memerlukan tambahan input produksi salah satunya adalah dengan menambah jumlah tenaga kerja. Ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah, maka penyerapan tenaga kerja juga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah faktor produksi.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan :

Achma Hendra Setiawan 2007 “ analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang” yang menyatakan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM di Kota Semarang adalah jumlah unit usaha, sedangkan variabel nilai output memiliki pengaruh yang paling kecil diantara variabel yang lain.

Siti Syuhada, Aulia Tasman, Hardiani (2014) “faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi” yang mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro di Kota Jambi dipengaruhi oleh upah riil dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah di Kota Jambi di pengaruhi oleh upah riil dan suku bunga riil.

Zulkarnain Nasution (2018) “analisis investasi, PAD dan jumlah unit UKM terhadap penyerapan tenaga kerja UKM di Kabupaten Labuhan Batu” yang

mengatakan bahwa secara simultan investasi UKM, PAD dan jumlah unit usaha UKM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten Labuhan Batu pada Tahun 2007 sampai 2016 pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Diwayana Putri Nasution, Annisa Ilmi Faried, Aldi Agustino (2020) “analisis determinan penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia” yang mengatakan bahwa berdasarkan variabel upah minimum (UM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PNG (Pengangguran). Untuk variabel JP (Jumlah Penduduk) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PNG (Pengangguran). sedangkan variabel PTK (Penyerapan Tenaga Kerja) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PNG (Pengangguran) dan untuk variabel PDB (Produk Domestik Bruto UMKM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PTK (Penyerapan Tenaga Kerja). variabel UMKM (Jumlah UMKM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PTK (Penyerapan Tenaga Kerja), sedangkan investasi (Investasi UMKM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PTK (Penyerapan Tenaga Kerja). variabel PNG (Pengangguran) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PTK (Penyerapan Tenaga Kerja).

Amin Budiawan (2013) “faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terhadap industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak” yang mengatakan bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak adalah upah tenaga kerja karena dari uji parsial menunjukkan bahwa nilai upah berkontribusi lebih besar.

## **2.6 Kerangka Konseptual Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kredit perbankan sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jambi. Penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kredit perbankan sektor industri sebesar 84,2% di Provinsi Jambi pada tahun 2006-2015. Peranan perbankan sebenarnya adalah sebagai sektor penunjang, yang berperan memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang, serta bertindak sebagai lembaga pengumpulan dana dalam masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Perbankan mengambil kegiatan dan menunjang perekonomian masyarakat, yaitu dalam rangka pemerataan hasil-

hasil pembangunan. Pemerataan pembangunan tercapai bila masyarakat luas diberi kesempatan berusaha secara lebih layak (Hasan Basri 2018).

Keterkaitan kredit berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi hanya terlihat di negara-negara dengan tingkat pembangunan yang telah mencapai level yang cukup baik. Pada tingkat individu bank, bank akan mendorong intermediasi finansial secara optimal dengan memberikan suku bunga kredit yang lebih kompetitif, apabila manajemen bank telah mencapai tingkat efisiensi biaya tertentu dalam memperoleh dan mengolah informasi dari debitur secara berkala (Bose dan Cothren, 1996; 1997).

Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian (Djunasien dan Hidayat, 2002:90). Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rosen, 2014; Sukirno, 2013).

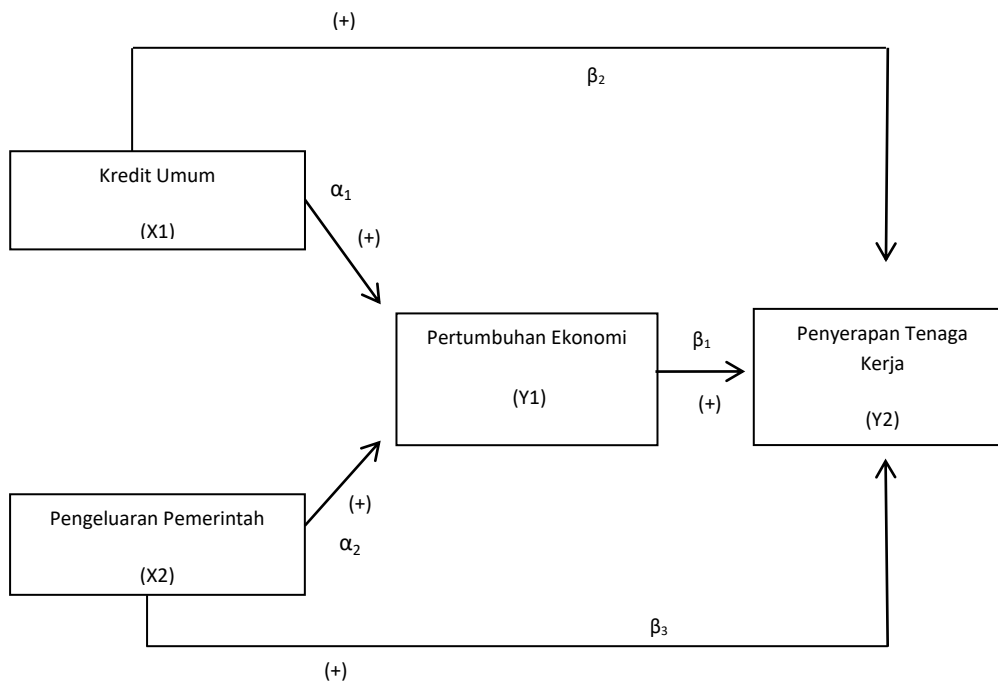
Keterkaitan hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi

untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Al-Shatti 2014) dan (Shivaranjani 2010) bahwa pengeluaran publik untuk infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama juga di tunjukkan dari studi (Gemmel, dkk 2012), yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal demikian mengindikasikan mengindikasikan bahwa penyediaan infrastruktur di perlukan dalam mendukung proses pembangunan daerah ataupun negara dan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Keterkaitan antara Pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetapi sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di antara masyarakat dan distribusi pendapatan serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti merupakan syarat perlu bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia. Dengan perkataan lain, yang diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam arti berpihak kepada tenaga kerja (Suparta, 2014).

Sehubungan dengan pemikiran ini, penulis membuat kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian ini sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir penelitian**



## 2.7 Hipotesis

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga terdapat pengaruh kredit umum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung (positif) maupun secara tidak langsung (positif) melalui pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah baik secara langsung (positif) maupun secara tidak langsung (positif) melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Diduga terdapat pengaruh langsung (positif) pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Teknik Pengumpulan Data: Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian dilakukan dengan menggunakan data Panel yakni gabungan *Time Series* (Tahunan mulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019) dan *Cross Section* (24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan). Data yang diperoleh dari BPS antara lain Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Penyerapan Tenaga Kerja pada 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan pada periode 2010 sampai 2019.

### 3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah regresi secara simultan yang kemudian di regresi menggunakan Software Amos. Kerangka konseptual dapat dinyatakan dalam persamaan simultan untuk estimasi regresi linear dengan fungsi sebagai berikut:

$$y_1 = f(x_1, x_2, x_3, ) \dots\dots\dots 3.1$$

$$y_2 = f(y_1, x_1, x_2, x_3,)\dots\dots\dots 3.2$$

Dimana:

$y_2$ : Penyerapan tenaga kerja, diukur dalam jiwa

$y_1$ : Pertumbuhan ekonomi, diukur rupiah

$x_1$ : Kredit umum, diukur dalam rupiah

$x_2$ : Pengeluaran pemerintah, diukur dalam rupiah

Persamaan 3.1. – 3.2. ini merupakan persamaan fungsional dalam regresi secara simultan yang kemudian dapat pula disajikan dengan *Reduced Form* sebagai berikut:



$$y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \mu_1 \dots\dots\dots 3.3$$

Dimana  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ , merupakan koefisien yang masing-masing menunjukkan pengaruh langsung variabel  $x_1$ ,  $x_2$ , terhadap variabel  $y_1$ .

$$y_2 = \beta_0 + \beta_1 y_1 + \beta_2 x_1 + \beta_3 x_2 + \mu_2$$

$$y_2 = \beta_0 + \beta_1 (\alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \mu_1) + \beta_2 x_1 + \beta_3 x_2 + \mu_2$$

$$y_2 = \beta_0 + \beta_1 \alpha_0 + \beta_1 \alpha_1 x_1 + \beta_1 \alpha_2 x_2 + \beta_1 \mu_1 + \beta_2 x_1 + \beta_3 x_2 + \mu_2$$

$$y_2 = \beta_0 + \beta_1 \alpha_0 + \beta_1 \alpha_1 x_1 + \beta_2 x_1 + \beta_1 \alpha_2 x_2 + \beta_3 x_2 + \beta_1 \mu_1 + \mu_2$$

$$y_2 = \beta_0 + \beta_1 \alpha_0 + (\beta_1 \alpha_1 + \beta_2) x_1 + (\beta_1 \alpha_2 + \beta_3) x_2 + \beta_1 \mu_1 + \mu_2$$

$$y_2 = \beta_0 + \alpha_0 \beta_1 + (\beta_2 + \alpha_1 \beta_1) x_1 + (\beta_3 + \alpha_2 \beta_1) x_2 + \mu_2 + \mu_1 \beta_1$$

$$y_2 = \zeta_0 + \zeta_1 x_1 + \zeta_2 x_2 + \mu_{12} \dots\dots\dots 3.4$$

Di mana:  $\zeta_0 = \beta_0 + \alpha_0 \beta_1$  adalah konstanta

$\zeta_1 = \beta_2 + \alpha_1 \beta_1$  adalah pengaruh total  $x_1$  terhadap  $y_2$  yang terdiri dari pengaruh langsung  $x_1$  terhadap  $y_2$  sebesar  $\beta_2$  ditambah pengaruh tidak langsung melalui  $y_1$  sebesar  $\alpha_1 \beta_1$ .

$\zeta_2 = \beta_3 + \alpha_2 \beta_1$  adalah pengaruh total  $x_2$  terhadap  $y_2$  yang terdiri dari pengaruh langsung  $x_2$  terhadap  $y_2$  sebesar  $\beta_3$  ditambah pengaruh tidak langsung melalui  $y_1$  sebesar  $\alpha_2 \beta_1$ .

$\mu_{12} = \mu_2 + \mu_1 \beta_1$  adalah *composite random error*

Dari uraian empat persamaan Reduced Form (Persamaan 3.1 - 3.2), koefisien pengaruh langsung dan tidak langsung baik dari variabel eksogen maupun endogen terhadap variabel penyerapan tenaga kerja ( $y_2$ ) dapat diidentifikasi.

### **3.3 Definisi Operasional**

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **3.3.1 Variabel Independen**

1. Kredit umum (X1) yaitu Penyediaan uang dari pihak bank untuk disalurkan ke masyarakat guna untuk meningkatkan usahanya. Yang dapat diukur dengan rupiah. Data yang digunakan adalah kredit umum pada 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2010-2019
2. Pengeluaran pemerintah (X3) yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan untuk membeli barang dan jasa untuk pengeluaran pemerintah. Yang dapat diukur dalam rupiah. Data yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2010-2019

#### **3.3.2 Variabel Dependen**

1. Pertumbuhan ekonomi (Y1) adalah laju tingkat pertumbuhan pada harga konstan yang dapat diukur dalam rupiah. Data yang digunakan adalah PDRB pada 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2010-2019
2. Penyerapan tenaga kerja (Y2) adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah yang dapat diukur dalam jiwa. Data yang di gunakan adalah tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah pada 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Struktur Ekonomi 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

Sulawesi Selatan memiliki peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

##### **4.1.1 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Selayar**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Selayar didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Selayar.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Selayar pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu mencapai 19,9 persen (angka ini meningkat dari 5,50 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,90 persen (angka ini meningkat 5,00 persen di Tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,31 persen (angka ini meningkat dari 7,90 persen di Tahun 2015). Kemudian disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 13,43 persen (angka ini meningkat dari 10,55 persen di Tahun 2015) kemudian selanjutnya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,51 persen (angka ini meningkat dari 7,40 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Kelima lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima

tahun terakhir, kelima lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.2 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bulukumba**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Bulukumba didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulukumba.

Kontribusi terbesar dalam pembentukn PDRB Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 37,13 persen (angka ini menurun dari 42,93 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,19 persen (angka ini meningkat 14,59 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,18 persen (angka ini meningkat dari 8,80 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah kategori yang mengalami penurunan peranan. Selama lima tahun terakhir, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan kontruksi mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir 2015-2019.

#### **4.1.3 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bantaeng**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Bantaeng didominasi oleh 2 (dua) katergori lapangan usaha, diantaranya : Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bantaeng.

Kontribusi terbesar dalam pembentukn PDRB Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengelohan sebesar 68,45 persen (angka ini meningkat 8,12 persen di Tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 10,68 persen (angka ini menurun dari 16,47 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Kedua lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil, dan Sepeda Motor mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yaitu 2015-2019.

#### **4.1.4 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Jeneponto**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Jeneponto didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil, dan Sepeda Motor ; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Jeneponto.

Kontribusi terbesar dalam pembentukn PDRB Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,76 persen (angka ini meningkat 0,08 persen di Tahun 2015), Disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 11,55 persen (angka ini meningkat dari 10,09 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,34 persen (angka ini meningkat dari 10,68 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,86 persen (angka ini meningkat dari 8,16 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Antara keempat lapangan usaha tersebut, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil, dan Sepeda Motor ; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. keempat lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.5 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Takalar**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Takalar didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pengadaan Listrik dan Gas; Administrasi Pemerintah, Pertahanan

an Jaminan Sosial; Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Takalar.

Kontribusi terbesar dalam pembentukn PDRB Kabupaten Takalar pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu mencapai 14,27 persen (angka ini meningkat dari 4,47 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 11,06 persen (angka ini meningkat 10,59 persen di Tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,17 persen (angka ini meningkat dari 6,55 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut, Pengadaan Listrik dan Gas; Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Industri Pengolahan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, ketiga lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.6 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Gowa**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Gowa didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gowa.

Kontribusi terbesar dalam pembentukn PDRB Kabupaten Gowa pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 27,01 persen (angka ini menurun dari 31,61 persen ditahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,11 persen (angka ini meningkat 11,67 persen di Tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,88 persen (angka ini meningkat dari 10,42 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah kategori yang mengalami penurunan peranan. Selama lima tahun terakhir, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan

kontribusi mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. kedua lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.7 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Sinjai**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Sinjai didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya : Penyedia Akomodasi Makanan Minuman; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai.

Kontribusi terbesar dalam pembentukn PDRB Kabupaten Sinjai pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makanan Minuman yaitu mencapai 12,46 persen (angka ini meningkat dari 5,70 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 12,37 persen (angka ini meningkat 7,75 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,86 persen (angka ini meningkat dari 6,48 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,33 persen (angka ini meningkat dari 806 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Antara keempat lapangan usaha tersebut, Penyedia Akomodasi Makanan Minuman; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Keempat lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.8 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Maros**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Maros didominasi oleh dua (dua) kategori lapangan usaha, diantaranya : Penyedia Akomodasi Makan Minum; Jasa Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Maros.

Kontribusi terbesar dalam pembentukn PDRB Maros pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan Penyedia Akomodasi Makan Minum yaitu mencapai 12,00 persen (angka ini meningkat dari 5,59 persen di Tahun 2015). Selanjutnya

lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 10,00 persen (angka ini meningkat 3,15 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Kedua lapangan usaha tersebut, Penyedia Akomodasi Makan Minum; Jasa Perusahaan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, kedua lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.9 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Pangkep**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Pangkep didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya : Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Pertambangan dan Penggalian; M,N. Jasa Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pangkep.

Kontribusi terbesar dalam pembentukn PDRB Kabupaten Pangkep pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu mencapai 13,15 persen (angka ini meningkat dari -3,84 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,61 persen (angka ini meningkat 10,68 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,32 persen (angka ini meningkat dari 7,98 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha M,N. Jasa Perusahaan sebesar 10,44 persen (angka ini meningkat dari 5,61 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Keempat lapangan usaha tersebut, : Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Pertambangan dan Penggalian; M,N. Jasa Perusahaan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, keempat lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.10 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Barru**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Barru didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya :Transportasi dan Pergudangan; Penyedia Akomodasi Makan Minum; Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan; Pengadaan Air ,Pengolahan



Sampah, Limbah dan Daur Ulang; M, N. Jasa Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barru.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Barru pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu mencapai 13,14 persen (angka ini meningkat dari 7,21 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,45 persen (angka ini meningkat 7,66 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan sebesar 10,93 persen (angka ini meningkat dari 6,30 persen di Tahun 2015). Kemudian disusul oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 10,47 persen (angka ini meningkat dari 0,33 persen di Tahun 2015). Kemudian selanjutnya M, N. Jasa Perusahaan sebesar 10,27 persen (angka ini meningkat dari 2,17 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Kelima lapangan usaha tersebut, : Transportasi dan Pergudangan; Penyedia Akomodasi Makan Minum; Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; M, N. Jasa Perusahaan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, kelima lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.11 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bone**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Bone didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bone pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu mencapai 16,62 persen (angka ini meningkat dari 7,30 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu mencapai 15,99 persen (angka ini meningkat 9,39 persen di Tahun 2015). Kemudian lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu mencapai 11,49 persen (angka ini meningkat dari 7,02 persen di Tahun 2015).

Disusul oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan yaitu mencapai 10,62 persen (angka ini meningkat dari 6,57 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Antara ke empat lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, kedua lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.12 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Soppeng**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Soppeng didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya : Penyedia Akomodasi Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; M,N. Jasa Perusahaan; Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan; Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan Minum yaitu mencapai 12,39 persen (angka ini meningkat dari 5,54 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha ; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,06 persen (angka ini meningkat 7,13 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 10,43 persen (angka ini meningkat dari 5,65 persen di Tahun 2015). Kemudian disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,24 persen (angka ini meningkat dari 9,05 persen di Tahun 2015). Kemudian selanjutnya M,N. Jasa Perusahaan sebesar 10,14 persen (angka ini meningkat dari 5,84 persen di Tahun 2015). Kemudian selanjutnya Administrasi Pemerintah , Pertahanan dan Jaminan sebesar 10,01 persen (angka ini meningkat dari 5,07 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Kelima lapangan usaha tersebut : Penyedia Akomodasi Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; M,N. Jasa Perusahaan; Pertambangan dan

Penggalian; Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, kelapangan enam usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.13 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Wajo**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Wajo didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wajo.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Wajo pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; yaitu mencapai 32,60 persen (angka ini menurun dari 32,97 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; yaitu mencapai 16,47 persen (angka ini meningkat 13,62 persen di Tahun 2015). Kemudian lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; yaitu mencapai 14,38 persen (angka ini menurun dari 20,36 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha ; Konstruksi; yaitu mencapai 10,24 persen (angka ini meningkat dari 9,46 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Antara ke empat lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Kemudian Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan selama lima tahun terakhir.

#### **4.1.14 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Sidrap**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Sidrap didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya : Penyedia Akomodasi Makan Minum; Transportasi dan Pergudangan ; M,N. Jasa Perusahaan; Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidrap.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sidrap pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan Penyedia Akomodasi Makan Minum yaitu mencapai 17,56 persen (angka ini meningkat dari 7,07 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengeloha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,13 persen (angka ini meningkat 11,80 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha M,N. Jasa Perusahaan sebesar 13,16 persen (angka ini meningkat dari 5,64 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 12,10 persen (angka ini meningkat dari 11,14 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Antara ke empat lapangan usaha tersebut, Penyedia Akomodasi Makan Minum; Transportasi dan Pergudangan ; M,N. Jasa Perusahaan; Informasi dan Komunikasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan selama lima tahun terakhir.

#### **4.1.15 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Pinrang**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Pinrang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : kontrukksi; Pengadaan Listrik Gas; Informasi dan Komunikasi; Industri dan Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha kontrukksi yaitu mencapai 11,60 persen (angka ini meningkat dari 6,43 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha ; Pengadaan Listrik Gas sebesar 11,38 persen (angka ini meningkat 3,56 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,96 persen (angka ini meningkat dari 8,16 persen di Tahun 2015). Kemudian disusul oleh lapangan usaha Industri dan Pengolahan sebesar 10,17 persen (angka ini meningkat dari 6,94 persen di Tahun 2015). Kemudian selanjutnya Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,11 persen (angka ini meningkat dari 7,97 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Kelima lapangan usaha tersebut, kontrukksi; Pengadaan Listrik Gas; Informasi dan Komunikasi; Industri dan Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan adalah kategori yang mengalami

peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, kelima lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.16 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Enrekang**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Enrekang didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, diantaranya : Industri dan Pengolahan; Jasa Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri dan Pengolahan sebesar 16,68 persen (angka ini meningkat dari 0,88 persen di Tahun 2015). Kemudian selanjutnya Jasa Perusahaan sebesar 10,30 persen (angka ini meningkat dari 5,93 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Kelima lapangan usaha tersebut, Industri dan Pengolahan; Jasa Perusahaan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, kedua lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.17 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Luwu didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, diantaranya : Administrasi Pemerintah , Pertahanan dan Jaminan; Industri dan Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintah , Pertahanan dan Jaminan sebesar 12,17 persen (angka ini meningkat dari 6,24 persen di Tahun 2015). Kemudian selanjutnya Industri dan Pengolahan sebesar 10,49 persen (angka ini meningkat dari 4,44 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Kelima lapangan usaha tersebut, Administrasi Pemerintah , Pertahanan dan Jaminan; Industri dan Pengolahan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, kedua lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.18 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Tanah Toraja**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Tanah Toraja didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, diantaranya : Industri dan Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Toraja.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Toraja pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri dan Pengolahan sebesar 15,95 persen (angka ini meningkat dari 8,17 persen di Tahun 2015). Kemudian selanjutnya Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,98 persen (angka ini meningkat dari 10,62 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Kelima lapangan usaha tersebut, Industri dan Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, kedua lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.19 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Utara**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Luwu Utara didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan; Penyedia Akomodasi Makan Minum. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Utara.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 13,35 persen (angka ini menurun dari 15,73 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha ; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,73 persen (angka ini meningkat 8,37 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan sebesar 11,28 persen (angka ini meningkat dari 5,69 persen di Tahun 2015). Kemudian disusul oleh lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan Minum sebesar 10,82 persen (angka ini meningkat dari 8,85 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Keempat lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan peranan sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan; Penyedia Akomodasi Makan Minum adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan selama lima tahun terakhir.

#### **4.1.20 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Timur**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya : Industri dan Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri dan Pengolahan yaitu mencapai 14,53 persen (angka ini meningkat dari 7,45 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha ; Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,99 persen (angka ini meningkat 7,55 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,73 persen (angka ini meningkat dari 10,68 persen di Tahun 2015). Kemudian disusul oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 10,51 persen (angka ini meningkat dari 5,87 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Keempat lapangan usaha tersebut : Industri dan Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan Pergudangan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, keempat lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.21 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Toraja Utara**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Toraja Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertambangan dan Penggalian; Penyedia Akomodasi dan Makan Minum; Transportasi dan Pergudangan; Administrasi Pemerintah dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat

dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Toraja Utara.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 20,15 persen (angka ini meningkat dari 15,63 persen di Tahun 2015). Selanjutnya Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,70 persen (angka ini meningkat 11,62 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,23 persen (angka ini menurun dari 14,92 persen di Tahun 2015). Kemudian disusul oleh Administrasi Pemerintah dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,91 persen (angka ini meningkat dari 10,40 persen di Tahun 2015). Kemudian disusul oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,49 persen (angka ini meningkat dari 9,39 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Kelima lapangan usaha tersebut : Pertambangan dan Penggalian; Penyedia Akomodasi dan Makan Minum; Administrasi Pemerintah dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan Selama lima tahun terakhir sedangkan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan peranan selama lima tahun terakhir.

#### **4.1.22 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Makassar**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya : Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Kontruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Makassar pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 20,46 persen (angka ini meningkat dari 18,26 persen di Tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengelohan sebesar 18,31 persen (angka ini meningkat 19,98 persen di Tahun 2015). Disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 18,22 persen (angka ini meningkat dari 16,49 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut,



konstruksi serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Selama lima tahun terakhir, kedua lapangan usaha ini terus mengalami peningkatan kontribusi.

#### **4.1.23 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Pare-Pare**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Pare-Pare didominasi oleh 1 (satu) kategori lapangan usaha, diantaranya : Administrasi Pemerintah dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pare-Pare.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pare-Pare pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintah dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu mencapai 14,44 persen (angka ini meningkat dari 4,53 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Lapangan usaha Administrasi Pemerintah dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan selama lima tahun terakhir dan terus mengalami peningkatan kontribusi .

#### **4.1.24 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Palopo**

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Palopo didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, diantaranya : Informasi dan Komunikasi; Perdagangan Besar dan Eceran,Reparansi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Palopo.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Palopo pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu mencapai 10,63 persen (angka ini meningkat dari 7,82 persen di Tahun 2015). Selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran,Reparansi Mobil dan Sepeda Motor yaitu mencapai 10,05 persen (angka ini menurun dari 12,21 persen di Tahun 2015).

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10 persen. Lapangan Perdagangan Besar dan Eceran,Reparansi Mobil dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami

peningkatan peranan selama lima tahun terakhir dan terus mengalami peningkatan kontribusi sedangkan lapangan usaha usaha Informasi dan Komunikasi malah mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.

## 4.2 Perkembangan Variabel Penelitian

### 4.2.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Penyerapan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas dan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penyerapan tenaga kerja merupakan persoalan mendasar yang dihadapi hampir seluruh daerah, masalah yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal tersebut berdampak kepada masyarakat sehingga mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karna minimnya lapangan pekerjaan.

**Tabel 4.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja sektor UMKM 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam jiwa)**

Kabupaten/ kota	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Selayar	15,129	15,803	6,503	5,340	6,038	8,262	10,627	9,750	8,065	4,939
Bulukumba	2,387	3,902	4,472	5,121	5,657	5,703	6,958	6,846	5,591	11,890
Bantaeng	9,902	6,811	1,223	2,440	2,676	3,686	4,120	6,426	7,323	8,413
Jeneponto	4,074	4,706	3,715	3,913	4,080	4,107	4,328	6,755	5,615	6,704
Takalar	1,677	7,674	4,203	4,450	4,660	4,761	5,018	15,960	11,031	16,411
Gowa	16,238	13,263	16,758	17,513	17,050	17,872	18,534	33,420	31,870	35,901
Sinjai	381	1,384	8,978	9,225	9,445	9,868	10,530	6,522	11,561	22,879
Maros	6,889	14,219	7,610	9,915	8,954	8,962	10,112	17,072	10,116	17,791
Pangkep	3,412	10,647	11,430	11,919	12,745	14,322	10,047	8,072	12,794	8,724
Barru	252	5,072	1,159	2,256	2,593	2,188	1,198	3,012	3,557	3,109
Bone	17,957	15,233	19,081	19,135	19,199	19,285	21,337	19,239	14,521	19,096

Soppeng	12,641	1,399	12,970	13,717	13,227	13,276	13,323	6,040	4,573	3,769
Wajo	30,693	20,776	30,082	31,951	18,157	19,055	19,225	13,618	13,802	20,079
Sindrap	11,876	12,308	12,811	16,018	12,969	16,364	17,527	10,483	8,139	10,604
Pinrang	1,228	9,174	15,268	16,086	16,904	17,595	17,976	5,632	6,569	8,610
Enrekang	3,805	9,174	6,499	6,527	5,278	5,583	6,072	3,092	4,262	5,548
Luwu	1,032	2,754	1,181	2,275	2,315	1,498	1,637	7,040	9,604	10,617
Tanah Toraja	1,670	2,341	1,015	1,078	2,025	1,102	1,911	5,094	4,810	4,390
Luwu Utara	3,833	3,596	6,511	6,622	7,217	7,636	8,087	10,163	6,763	7,019
Luwu Timur	564	1,775	312	1,231	2,216	3,550	3,600	2,520	6,387	5,368
Toraja Utara	650	2,731	1,015	1,093	1,025	2,102	1,991	6,095	4,271	6,787
Makassar	33,765	35,716	35,095	36,242	36,327	38,364	41,861	33,013	11,075	14,549
Pare-pare	3,225	3,579	4,341	6,303	6,340	5,403	4,522	3,565	3,645	4,727
Palopo	1,611	2,517	11,050	12,683	13,293	14,920	13,381	14,129	10,711	4,186

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 perkembangan perubahan data penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2010 hingga Tahun 2019 mengalami fluktuasi pada rentang waktu 2010 hingga Tahun 2019 dan meskipun terjadi peningkatan akan tetapi peningkatan yang terjadi sangat minim sekali di sektor penyerapan tenaga kerja. Kota Makassar yang mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi dari Kabupaten/Kota lainnya pada rentang waktu 2010 hingga 2019 dengan Tenaga kerja sebesar 41,861 jiwa pada tahun 2017. Pada tabel 4.1 terlihat bahwa Kabupaten Barru adalah Kabupaten yang mempunyai penyerapan tenaga kerja terendah yaitu sebesar 252 jiwa dan terjadi pada Tahun 2010 pada rentang waktu 2010 hingga 2019.

#### **4.2.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan ekonomi dari suatu wilayah dalam periode tertentu yang pada umumnya dalam kurung waktu satu tahun dasar. Maksud perhitungan ini ialah mengetahui pertumbuhan riil ekonomi yang nilainya telah terbebas dari pengaruh harga baik inflasi maupun deflasi.

**Tabel 4.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam triliun rupiah)**

Kabupaten/ kota	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Selayar	1,807	1,963	2,122	2,296	2,503	2,724	2,924	3,147	3,422	3,685
Bulukumba	4,740	5,000	5,483	5,809	6,413	6,774	7,232	7,730	8,121	8,567
Bantaeng	2,693	2,943	3,234	3,525	3,819	4,073	4,374	4,694	5,075	5,621
Jeneponto	3,556	3,856	4,147	4,422	4,773	5,085	5,508	5,963	6,338	6,685
Takalar	3,321	3,573	3,809	4,144	4,548	4,932	5,405	5,803	6,191	6,616
Gowa	7,132	7,664	8,289	9,707	9,720	10,380	11,166	11,971	12,825	13,783
Sinjai	3,781	4,069	4,366	4,706	5,035	5,413	5,799	6,218	6,681	7,090
Maros	7,315	8,135	9,044	9,612	10,066	10,916	11,954	11,768	13,558	13,726
Pangkep	8,652	9,503	10,288	11,248	12,419	13,367	14,477	15,433	16,168	17,205
Barru	2,560	2,760	3,000	3,237	3,474	3,694	3,916	4,169	4,466	4,797
Bone	11,055	11,763	12,730	13,531	14,421	16,05,1	17,498	18,970	20,660	22,108
Soppeng	3,716	3,983	4,245	4,565	4,882	5,131	5,547	6,007	6,494	6,993
Wajo	7,520	8,280	8,819	9,428	10,341	11,071	11,620	12,225	12,357	12,858
Sindrap	4,436	4,863	5,297	5,556	6,110	6,600	7,179	7,688	8,075	8,450
Pinrang	6,595	7,104	7,708	8,269	8,940	9,677	10,397	11,212	11,987	12,770
Enrekang	2,605	2,815	3,021	3,197	3,389	3,623	3,899	4,166	4,302	4,535
Luwu	5,123	5,528	5,915	6,372	6,934	7,437	8,023	8,567	9,155	9,728
Tanah Toraja	2,387	2,572	2,793	2,994	3,198	3,417	3,666	3,940	4,251	4,558
Luwu Utara	4,255	4,597	4,911	5,274	5,739	6,122	6,580	7,081	7,675	8,221
Luwu Timur	11,834	11,324	11,963	12,717	13,748	14,631	14,862	15,318	15,837	16,022
Toraja Utara	2,505	2,715	2,971	3,261	3,510	3,782	4,085	4,421	4,778	5,140
Makassar	58,556	65,622	70,851	76,907	82,592	88,828	95,957	103,826	112,568	122,465
Pare-pare	2,670	2,895	3,150	3,400	3,615	3,843	4,107	4,394	4,639	4,947
Palopo	2913	3143	3363	3633	3889	4140	4428	4745	5102	5447

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 perkembangan perubahan data PDRB di 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2010 hingga Tahun 2019 mengalami tren yang meningkat serta mempunyai PDRB yang meningkat setiap tahunnya di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tabel 4.2 ini menunjukkan data Kabupaten yang mempunyai jumlah PDRB terendah dari rentang waktu 2010-2019 adalah Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,387 triliun. Untuk Kabupaten yang mempunyai jumlah PDRB tertinggi dari rentang waktu 2010-2019 ialah Kota Makassar dengan jumlah PDRB sebesar 122,465 Triliun yang terjadi pada Tahun 2019.

#### **4.2.3 Perkembangan Kredit umum 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan**

Kredit umum adalah penyedia uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang disalurkan oleh bank umum dan bank swasta yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Kredit umum ini diberikan kepada masyarakat umum untuk digunakan dalam pengembangan usaha sekaligus modal usaha.

**Tabel 4.3 Perkembangan Kredit Umum 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (dalam milyar rupiah)**

Kabupaten /kota	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Selayar	46,798	64,059	77,296	93,113	110,376	67,000	81,100	18,753	24,5658	25,612
Bulukumba	13,331	15,828	20,358	23,201	26,733	22,556	22,551	26,332	27,746	30,423
Bantaeng	12,804	12,337	16,992	15,823	17,477	13,281	15,584	16,731	18,350	19,794
Jeneponto	23,019	25,061	33,855	17,408	27,000	23,031	33,211	38,758	33,823	49,937
Takalar	17,494	17,504	18,368	17,240	22,661	27,047	17,331	32,084	29,672	36,095
Gowa	21,470	21,549	20,733	60,,515	68,090	23,589	23,599	166,566	174,556	180,454
Sinjai	42,434	40,640	43,656	52,232	57,068	62,248	92,652	94,846	97,229	97,250
Maros	19,457	14,569	20,000	13,484	20,595	43,711	10,476	11,590	12,671	128,716
Pangkep	22,500	22,799	24,197	12,876	20,876	36,632	61,197	128,608	131,414	155,510
Barru	8,625	8,928	10,500	78,785	12,565	14,473	15,311	11,796	12,550	15,812

Bone	13,033	13,451	13,507	13,876	14,208	14,527	24,770	16,399	25,504	36,605
Soppeng	36,221	37,736	38,240	41,422	41,713	45,429	50,992	53,444	63,840	73,650
Wajo	55,247	58,390,	59,629	60,471	82,386	95,340	99,731	138,786	141,654	141,989
Sindrap	17,990	18,321	18,827	35,325	23,776	60,120	70,250	61,320	72,550	98,720
Pinrang	35,242	40,250	50,750	60,120	63,350	70,673	89,658	90,495	90,495	90,575
Enrekang	12,386	14,664	17,298	28,316	23,843	30,032	30,405	33,735	10,708	42,464
Luwu	28,438	42,086	45,167	35,140	32,164	23,964	21,7016	43,446	43,924	44,035
Tanah Toraja	20,390	30,850	13,802	13,822	16,858	17,584	18,038	80,249	72,500	80,650
Luwu Utara	10,525	11,011	11,373	12,073	23,164	23,964	31,256	43,461	43,933	45,033
Luwu Timur	3,904	4,935	6,476	6,450	11,073	12,290	62,328	63,562	69,196	70,251
Toraja Utara	3,873	5,044	7,165	9,463	10,560	12,746	13,319	12,767	10,118	18,150
Makassar	27,657	35,289	45,459	51,176	57,202	65,937	68,369	72,660	73,926	80,719
Pare-pare	35,471	36,909	44,459	24,556	27,527	48,958	53,992	66,620	67,058	84,447
Palopo	17,791	19,962	18,660	16,450	23,550	25,012	37,579	37,690	38,320	39,845

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (data diolah)*

Berdasarkan Tabel 4.3 perkembangan perubahan data kredit umum 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2010 hingga Tahun 2019 mengalami fluktuasi pada rentang waktu 2010 hingga Tahun 2019 dan meskipun terjadi peningkatan akan tetapi peningkatan yang terjadi sangat minim sekali di sektor kredit umum. Kabupaten Gowa yang mempunyai tingkat kredit umum tertinggi dari Kabupaten/Kota lainnya pada rentang waktu 2010 hingga 2019 dengan kredit umum sebesar 180,454 milyar ( pada Tahun 2019. Pada tabel 4.3 dan terlihat bahwa Kabupaten Toraja Utara adalah Kabupaten yang mempunyai kredit umum terendah yaitu sebesar 3,873 milyar dan terjadi pada Tahun 2010 pada rentang waktu 2010 hingga 2019.

#### **4.2.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan**

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses pembangunan terutama dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai macam kebijakan yang ada.

**Tabel 4.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2010-2019 (dalam triliun rupiah)**

Kabupaten /kota	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Selayar	4,471	4,131	5,013	6,328	7,174	7,320	9,397	9,218	11,344	10,757
Bulukumba	5,397	5,267	7,584	8,635	11,567	13,387	15,233	16,230	14,460	15,141
Bantaeng	3,800	3,727	4,613	6,135	6,312	6,835	7,753	8,992	9,481	11,026
Jeneponto	3,965	4,606	6,593	7,215	8,232	9,659	13,173	11,605	12,352	14,029
Takalar	4,265	4,144	8,303	6,932	9,363	9,913	13,463	10,438	11,837	11,858
Gowa	6,842	6,477	10,657	10,382	14,559	13,787	17,347	15,775	19,761	19,272
Sinjai	4,479	4,356	6,936	6,445	8,439	9,266	12,694	11,669	11,839	13,515
Maros	4,752	4,795	7,541	9,303	10,025	11,563	14,001	12,769	14,515	14,814
Pangkep	5,883	5,581	4,977	8,775	11,198	11,294	14,688	13,174	14,357	14,287
Barru	5,013	4,171	12,462	6,032	7,802	8,189	11,299	11,875	11,391	10,177
Bone	8,083	7,576	6,637	14,662	16,291	18,417	22,029	23,229	23,407	23,938
Soppeng	5,036	4,688	8,707	7,132	9,128	9,974	13,156	12,659	11,560	11,838
Wajo	6,092	5,462	6,757	10,133	12,550	12,370	16,102	14,965	14,428	16,101
Sindrap	5,966	5,608	7,024	8,258	8,220	10,612	12,139	13,958	12,030	12,849
Pinrang	5,352	4,860	5,586	8,049	10,625	10,432	14,221	13,698	14,251	12,782
Enrekang	4,524	4,253	6,198	6,305	7,580	8,683	11,087	10,067	10,211	10,960
Luwu	4,632	4,712	6,322	6,554	10,442	8,343	15,504	13,542	13,573	14,809
Tanah Toraja	4,439	4,073	6,456	7,682	8,618	11,452	11,444	12,238	11,438	12,900
Luwu Utara	4,790	4,606	6,932	7,443	12,670	11,859	12,148	12,491	13,032	13,899
Luwu Timur	7,259	4,773	7,308	7,837	10,214	10,784	14,135	15,212	15,711	16,322
Toraja Utara	1,796	1,785	5,262	6,050	7,512	8,089	8,940	9,474	10,733	11,201
Makassar	12,410	12,083	20,941	20,267	33,363	30,622	36,913	34,514	37,008	43,149
Pare-pare	3,918	3,677	5,524	6,390	7,410	7,833	10,756	9,894	8,247	9,478
Palopo	3,860	3,949	4,891	5,577	7,467	7,619	11,156	9,952	10,026	10,141

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 perkembangan perubahan data Pengeluaran Pemerintah 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2010 hingga Tahun 2019 mengalami fluktuasi pada rentang waktu 2010 hingga Tahun 2019 dan meskipun terjadi peningkatan akan tetapi peningkatan yang terjadi sangat minim sekali pada pengeluaran pemerintah. Kota Makassar yang mempunyai tingkat pengeluaran pemerintah tertinggi dari Kabupaten/Kota lainnya pada rentang waktu 2010 hingga 2019 dengan Pengeluaran Pemerintah sebesar 43,149 triliun pada tahun 2019. Pada tabel 4.4 dan terlihat bahwa Kabupaten Toraja Utara adalah kabupaten yang mempunyai pengeluaran pemerintah terendah yaitu sebesar 1,785 triliun dan terjadi pada Tahun 2011 pada rentang waktu 2010 hingga 2019.

#### **4.3 Hasil Estimasi Pengaruh Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah, Terhadap PDRB, dan Penyerapan Tenaga Kerja.**

Analisis regresi linear secara simultan digunakan untuk mengestimasi besaran pengaruh langsung (Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah, terhadap Penyerapan Tenaga Kerja) maupun tidak langsung (Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah melalui PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja). Adapun yang menjadi variabel eksogen yaitu Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah. Sedangkan variabel endogen yaitu PDRB, Penyerapan Tenaga Kerja. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor penentu Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan, maka dilakukan analisis regresi dengan variabel perantara yang mengestimasi besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pada analisis regresi dengan variabel perantara, yang menjadi variabel endogen adalah PDRB (Y1), Penyerapan Tenaga Kerja (Y2) sedangkan variabel eksogen terdiri dari Kredit Umum (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2). Pada Tabel 4.6 berikut ini di sajikan hasil estimasi fungsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Penyerapan Tenaga Kerja.



**Tabel 4.6 Hasil Estimasi Fungsi PDRB (Y1), Fungsi Penyerapan Tenaga Kerja (Y2)**

Arah Pengaruh antar Variabel	Koefisien Regresi	t-Statistik	Probability
Kredit umum ( $x_1$ ) → PDRB ( $y_1$ )	-59,3905164092	-2,87955728	0,003982340
Pengeluaran Pemerintah ( $x_2$ ) → PDRB ( $y_1$ )	2,4206304418	20,884862889	0.000000000
Kredit umum ( $x_1$ ) → PTK ( $y_2$ )	0,0000000707	5,5596943864	0.000000000
Pengeluaran Pemerintah ( $x_2$ ) → PTK ( $y_2$ )	0,0000000001	0,6313044619	0.527841470
PDRB ( $y_1$ ) → PTK ( $y_2$ )	0.0000000002	5,8320906147	0.000000000
*)Signifikan pada $\alpha = 5\%$ ; R2 Y1 = 0,6503135059; R2 Y2 = 0,3606371236; N = 240			

Sumber : IBM SPSS Amos 22

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai R2 PDRB (Y1) yaitu sebesar 0,6503135059 Berarti 65,0 persen variasi perubahan PDRB dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel-variabel Kredit Umum (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2) Sedangkan sisanya sebesar 35,0 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Selanjutnya pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil estimasi untuk fungsi PDRB menunjukkan nilai t-statistik Kredit Umum terhadap PDRB yaitu sebesar -2,87955728 dan koefisien regresi sebesar -59,3905164092. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kredit Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat PDRB. Hal ini berarti setiap peningkatan 1 milyar peningkatan Kredit Umum maka akan mengurangi PDRB 593,905,164 juta

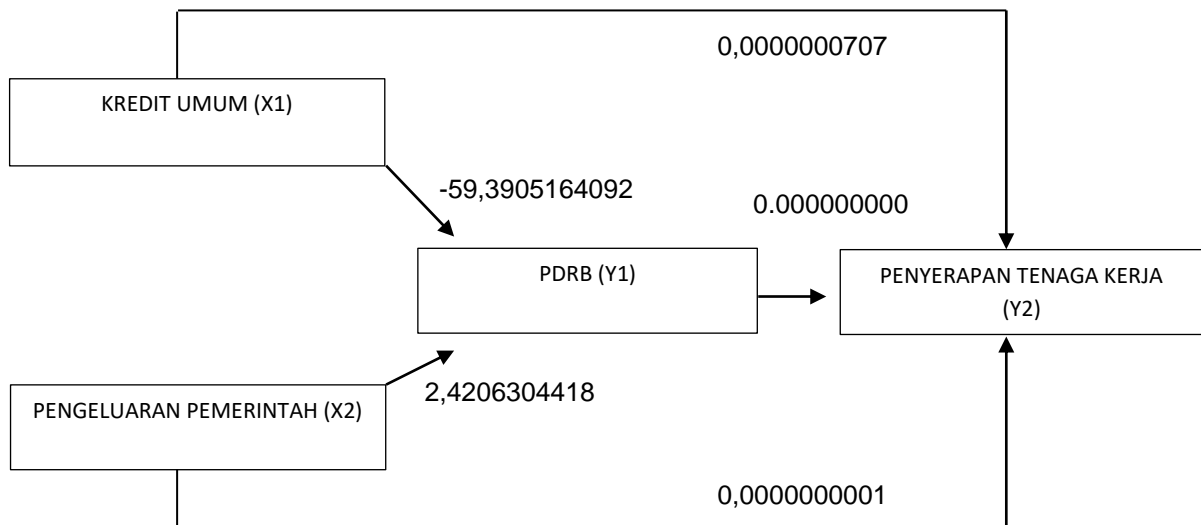
Kemudian pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil estimasi untuk fungsi PDRB menunjukkan nilai t-statistik Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB yaitu sebesar 20,884862889 dan koefisien regresi sebesar 2,4206304418. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hal ini berarti setiap 1 triliun peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 242,063,044 juta.

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai R<sup>2</sup> Penyerapan Tenaga Kerja (Y<sub>2</sub>) yaitu sebesar 0,3606371236. Berarti 36,2 persen variasi perubahan Penyerapan Tenaga Kerja dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel-variabel Kredit Umum (X<sub>1</sub>), Pengeluaran Pemerintah (X<sub>2</sub>). Sedangkan sisanya sebesar 63,8 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil estimasi untuk fungsi Penyerapan Tenaga Kerja menunjukkan nilai t-statistik Kredit Umum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja yaitu sebesar 5,5596943864 dan koefisien regresi sebesar 0,0000000707. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kredit Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja . Hal ini berarti setiap 1 milyar peningkatan Kredit Umum maka akan meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 71 jiwa

Kemudian pada Tabel 4.6 dapat pula dilihat bahwa hasil estimasi untuk fungsi PDRB menunjukkan nilai t-statistik PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja yaitu sebesar 5,8320906147 dan koefisien regresi sebesar 0.0000000002. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Hal ini berarti setiap 1 triliun peningkatan PDRB maka akan meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 200 jiwa

Berdasarkan keterangan Sesuai dengan hipotesis yang dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan tabel 4.6, hasil penelitian dapat pula disajikan seperti pada Gambar 4.8 dibawah ini.



\*)Signifikan pada  $\alpha = 5\%$

**Gambar 4.1 Hasil Estimasi**

#### **4.3.1 Pengaruh Kredit Umum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui PDRB**

Pengaruh langsung kredit umum terhadap Penyerapan tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Pengaruh signifikan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan kredit umum mempengaruhi perubahan penyerapan kerja. sesuai dengan hasil penelitian (Hasan Basri 2018) yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara kredit perbankan sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jambi pada Tahun 2006-2015. Adapun pengaruh permintaan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan tersebut mengindikasikan bahwa pemberian kredit umum sudah efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) . Hal ini terjadi karena sasaran utama dari adanya kredit umum dari perbankan adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, serta bertindak sebagai lembaga pengumpulan dana dalam masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam prakteknya dalam berkembangnya sektor UMKM sangat di tunjang dengan adanya bantuan dana dari pihak perbankan yang secara langsung akan mengembangkan usahanya, setelah keadaan UMKM semakin berkembang maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan

penelitian yang dilakukan Hasan Basri (2018) yang mengatakan perbankan memegang peranan yang sangat penting menjadi suatu badan yang dapat menunjang pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan salah satunya adalah sektor industri. Pembangunan pada sektor industri merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju. Industrialisasi memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, perluasan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja sebagai langkah agar terpenuhinya tujuan nasional yaitu kemakmuran rakyat. Sehingga dalam penelitian ini variabel kredit umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh tidak langsung Kredit umum terhadap penyerapan tenaga kerja melalui PDRB yang negatif dan signifikan mengindikasikan bahwa kredit umum tidak langsung meningkatkan PDRB dan secara tidak langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pengaruh negatif tersebut mengindikasikan bahwa perubahan kredit umum secara tidak langsung mempengaruhi perubahan PDRB. Hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis awal yang diteliti oleh (Khairuna 2018). yang mengatakan bahwa Kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Adanya pengaruh negatif yang disebabkan oleh kredit itu adalah utang yang harus dibayar oleh para pelaku usaha. Harapannya para pelaku usaha dengan banyaknya kredit yang diambil maka akan semakin meningkatkan jumlah usaha mereka yang akan berdampak peningkatan penyerapan tenaga kerja dan secara langsung akan meningkatkan PDRB, akan tetapi perlu diingat bahwa kredit itu adalah utang yang harus dibayar. Dengan banyaknya kredit yang diambil oleh para pelaku usaha mereka tidak akan mampu untuk membayar cicilan utang yang diambil. Sehingga akan berdampak pada penutupan usaha, menjual asset usaha, dan lebih parahnya perbankan akan menyita usaha-usaha yang sedang berjalan sehingga berdampak pada menurunnya PDRB.

Hal ini sesuai dengan penelitian Zainal Fathor Rachman dan Agus Sriyanto (2010) dengan judul penelitian Analisis kontribusi kredit investasi, Modal Kerja Dan Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Periode 2005-2009. Dalam penelitian ini pertumbuhan pembiayaan modal kerja memiliki hubungan tidak searah dan tidak signifikan. Pemberian pembiayaan modal kerja

oleh perbankan umumnya berjangka waktu pendek dan menengah, sehingga hasil atau dampak pembiayaan yang diberikan belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan sektor industri. Jika ditinjau dari kebijakan perusahaan terhadap penggunaan dana, hal ini bisa disebabkan oleh pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh perbankan terhadap perusahaan (debitur) dipergunakan untuk menjaga produksi yang dihasilkan perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipergunakan perusahaan untuk pembelian kekurangan bahan baku, membayar gaji atau upah pegawai, overhead cost dan lain-lain sehingga tidak mempertimbangkan dampak tagihan pembayaran dari pengambilan kredit kedepannya.

Kemudian di pertegas oleh penelitian Norhidayah (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Kredit Sektoral terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan 2012-2016. Dalam penelitian ini kredit sektor industri mempunyai pengaruh yang negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya dampak negatif yang dihasilkan apabila jumlah penyaluran kredit sektor industri pengolahan dinaikkan, hal ini juga tentunya sangat bertentangan dengan teori-teori pertumbuhan ekonomi yang mana disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila kegiatan-kegiatan produksi yang ada juga meningkat, dengan adanya pemberian kredit dari pihak perbankan diharapkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk industri pengolahan swasta maupun negeri mampu meningkat seiring bertambahnya kredit yang diberikan akan tetapi hasil yang didapatkan dari estimasi peneliti menunjukkan hasil yang sebaliknya terjadi penurunan produksi.

Sehingga dengan membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung kredit umum terhadap penyerapan tenaga kerja melalui PDRB maka dengan demikian diharapkan para pelaku usaha lebih bijaksana dalam pengambilan kredit umum untuk keperluan pengembangan usaha yang perlu diketahui bahwa kredit umum itu adalah utang yang harus dibayar sehingga apabila para pelaku usaha terlalu banyak mengambil pinjaman kredit di perbankan maka akan berdampak menurunkan jumlah usaha. Seharunya Para pelaku usaha apabila ingin mengambil pinjaman kredit di perbankan harus mempertimbangkan dampak kedepannya sesuai dengan kemampuan yang bisa untuk membayar cicilan utang dari pihak perbankan sehingga tidak terjadi penyitaan usaha dari pihak perbankan. Dengan penggunaan kredit umum yang

efektif maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan bertambahnya jumlah usaha sehingga akan meningkatkan PDRB.

#### **4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui PDRB.**

Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang positif dan tidak signifikan. Pengaruh tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi perubahan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. kemudian tidak yang sejalan dengan penelitian Galang Kanigara Jagaditha dan Gusti Wayan Murjana (2020) yang menyatakan Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan. Pengaruh tidak signifikan Mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah dalam hal ini pembangunan infrastruktur tidak langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja akan tetapi lebih mempengaruhi perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perlu di ketahui bahwa UMKM itu adalah usaha kreatif bukan sektor industri yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, UMKM hanya mampu menyerap tenaga kerja 1-5 orang saja sehingga pembangunan infrastruktur sangat di perlukan untuk menambah jumlah usaha UMKM. Pengeluaran pemerintah adalah penyediaan infrastruktur untuk proses pembangunan daerah ataupun negara dalam jangka panjang (Gammel, dkk 2012). Dengan adanya Pembangunan infrastruktur salah satunya adalah adalah perbaikan jalan. Jalanan yang rusak yang dulunya kurang yang mau membuka usaha di tempat tersebut dengan adanya perbaikan jalan maka para pelaku usaha semakin menambah jumlah usahanya yang akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Penelitian ini sejalan dengan dengan Alkadri (2008) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Investasi Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 1985-2006. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja. Tidak signifikannya

pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja dikarenakan, apabila pengeluaran pemerintah tersebut yang digunakan untuk pembangunan. Pembangunan tersebut tidak lagi berjalan atau stagnan, dikarenakan tidak adanya investor. Implikasinya tidak adanya penyerapan tenaga kerja di sektor pembangunan tersebut. Contoh : pembangunan bandara yang tidak maksimal maka akan menyebabkan tidak adanya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan bandara tersebut. Sehingga kesempatan kerja pun juga akan kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Demi Putri, Ali Anis, Mike Triani (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Ketenagakerjaan, Pengeluaran Pemerintah Dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia pada tahun 1988-2017. Hasil penelitian menunjukkan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan penelitian Menurut Kurniawan (2014) infrastruktur jalan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kondisi permukaan jalan sangat signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah. Dapat disimpulkan bahwa infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dimana peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan berupa penambahan kuantitas serta peningkatan kualitas. Adapun infrastruktur jalan meningkat akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat, dikarenakan infrastruktur jalan akan member kemudahan dalam arus perekonomian sehingga mendorong peningkatan pendapatan perkapita yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan.

Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja melalui tingkat PDRB menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Adanya pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi dalam tingkat kesempatan kerja melalui PDRB. Pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rosen, (2014); Sukirno, (2013) bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sehingga dengan membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja melalui PDRB maka dengan demikian diharapkan dengan adanya pengeluaran pemerintah lebih difokuskan pada peningkatan infrastruktur salah satunya adalah perbaikan jalan untuk para pelaku usaha khususnya UMKM yang berguna dalam menambah jumlah usaha dengan semakin bertambahnya usaha secara langsung akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sehingga mempengaruhi peningkatan PDRB.

#### **4.3.3 Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Pengaruh langsung PDRB terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa perubahan PDRB mempengaruhi perubahan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan dengan penelitian oleh Putri (2018) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan penyerapan tenaga kerja. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2008). Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Sehingga dengan membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. diharapkan pemerintah lebih meningkatkan lagi dalam produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak khususnya di Sulawesi Selatan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengaruh langsung kredit umum terhadap penyerapan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Serta pengaruh tidak langsung kredit umum terhadap penyerapan tenaga kerja melalui PDRB negatif dan signifikan. Adanya pengaruh negatif yang disebabkan oleh kredit itu adalah utang yang harus di bayar oleh para pelaku usaha. Dengan banyaknya kredit umum yang diambil maka akan semakin meningkatkan jumlah usaha mereka yang akan berdampak peningkatan penyerapan tenaga kerja dan secara otomatis akan meningkatkan PDRB. Akan tetapi perlu diingat bahwa kredit itu adalah utang yang harus dibayar dalam jangka panjang. Dengan banyaknya kredit yang diambil oleh para pelaku usaha mereka tidak akan mampu untuk membayar cicilan utang yang diambil sehingga akan berdampak pada penutupan usaha, menjual asset usaha, dan lebih parahnya perbankan akan menyita usaha-usaha yang sedang berjalan sehingga berdampak pada menurunnya PDRB dalam jangka panjang.
2. Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan. Begitupun Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja melalui tingkat PDRB menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Pengaruh tidak signifikan Mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah dalam hal ini pembangunan infrastruktur tidak langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja akan tetapi lebih mempengaruhi perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diketahui UMKM adalah usaha kreatif bukan sektor industri yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, UMKM hanya mampu menyerap tenaga kerja 1-5 orang saja sehingga pembangunan infrastruktur sangat di perlukan untuk menambah jumlah usaha UMKM. Dengan adanya Pembangunan infrastruktur salah satunya adalah perbaikan jalan. Dengan adanya perbaikan jalan maka para pelaku usaha semakin menambah jumlah usahanya yang akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan PDRB..

3. Pengaruh langsung PDRB melalui penyerapan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Dengan lebih mengembangkan untuk meningkatkan lagi produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak khususnya di Sulawesi Selatan.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan para pelaku usaha apabila ingin mengambil pinjaman kredit di perbankan harus mempertimbangkan dampak kedepannya sesuai dengan kemampuan yang bisa untuk membayar cicilan utang dari pihak perbankan sehingga tidak terjadi penyitaan usaha dari pihak
2. perbankan. Dengan penggunaan kredit umum yang efektif maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan bertambahnya jumlah usaha sehingga akan meningkatkan PDRB.
3. Diharapkan dengan adanya pengeluaran pemerintah lebih difokuskan pada peningkatan infrastruktur salah satunya adalah perbaikan jalan untuk para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang berguna dalam menambah jumlah usaha dengan semakin bertambahnya usaha secara langsung akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sehingga mempengaruhi peningkatan PDRB.
4. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan lagi produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak khususnya di Sulawesi Selatan.
5. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk memasukkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Putri Hapsari. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014*. JIEP, 18(1).
- Andirfa, Mulia., Hasan Basri., M. Shabri A. Majid. 2016. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi. ISSN 2302-0164. Volume 5, No.
- Astari, M., Hamzah, L., & Ratih, A. (2019, April 5). *Hukum OKUN: Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*,8(1),3744,
- Achma Hendra Setiawan. 2007. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dikota Semarang*
- Amin Budiawan. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil Pengolahan Ikan Di Kabupaten Demak*
- Azrin, M. 2004. *Dampak Ekonomi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Kota Bogor*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (Ipb). Bogor
- Al Fatih, D. (2016). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Terdiri Dari Bmt, Bprs, Dan Koperasi Syariah*. 03-05-2016. 03-05-2016. Diakses Dari *Syariah-Lkms.Htm*
- Alkadri 2008 *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja*
- Alkadri. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis

- Alexiou, C. (2009). *Government Spending And Economic Growth: Econometric Evidence From The South Eastern Europe (See)*. *Journal Of Economic And Social Research*, 11(1)
- Akmal 2014 *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Pada Bank Umum Di Aceh Universitas Syiah Kuala :Banda Aceh*
- Adisasmita, Raharjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi Dan Pengangguran (Kurva Phillips) Di Indonesia*
- Al-Shatti 2014. *The Impact of Public Expenditures on Economic Growth in Jordan*
- Amri Amir. 2007. "Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia". *Jurnal Inflasi dan Pengangguran*, 2007, jambi.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.Sulawesi Dalam Angka. 2019
- Basri, Faisal. 2010. *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Erlangga,
- Boediono. 1998. *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*.Yogyakarta: Bpfe
- Bezemer 2014 *A Resaource For Making Meaning Australia Journal Of Language And Literacy Uploaded*.
- Darman 2013 *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran: Analisis Hukum Okun*
- Djuhairi M Wiratakusumah, Bayang-bayang Ekonomi Klasik, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen P&K, 1998) hal 76.
- Diwayana Putri Nasution, Annisa Ilmi Faried, Aldi Agustino. 2020. *Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Umukm Di Indonesia*
- Enterprise, Jubile. 2018. *Lancar Menggunakan Spss Untuk Pemula*. Jakarta: Pt. Alex Medika Komputimdo

- Gusti Agung Indra Dewa 2013 *Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali*
- Gemmell, Norman dan Marissa Ratto. (2012). *Behavioral Responses to Taxpayer Audits : Evidence from Random Taxpayer Inquiries. National Tax Journal. Vol. 65(1), 33-58, March.*
- Galang Kanigara Jagaditha dan Gusti Wayan Murjana (2020) dengan judul *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2015-2019*
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah. Jakarta:Pt Bumi Aksara*
- Hellen, H., Mintarti, S., & Fitriadi, F. (2018). *Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. Inovasi, 13(1), 28.*
- Indayati, Indartini, Mintarti & Djumhariyati, Retno. 2010. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Genteng (Studi Kasus di Desa Baderan Kec. Geneng Kab. Ngawi). Jurnal Sosial, Vol.11, (No.2), September 2010*
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana.*
- Janie, Dyah Nirmala Arum. 2012. *Statistik Deskriptif Dan Regresi Linear Berganda Dengan Spss. Semarang University Press.*
- Jakstiene, S. 2010. *Labour Market Segmentation: Theoretical Aspect. Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektyvos. Vol. 4, No. 20, Halaman: 53 - 63*
- Jagaditha, Galang Kanigara; Yasa, I Gusti Wayan Murjana. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, [S.L.], V. 10, N. 12, P. 4563 – 4590, Jan. 2022. Issn 2303-0178. Available At:*

- Karl E, Case Dan Ray C, Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, ( Edisi Terjemahan, Jilid Ke-2, Edisi Ke-8, Jakarta: Erlangga), Hlm. 226
- Kasmir. 2016:73. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Kasmir. 2016. *Dasar-Dasar Perbankan, edirevisi2014*. Jakarta rajawali per.
- Kuncoro, Haryo. 2002. *Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, hal 45- 56 Vol. 7, No 1, 2002. ISSN:1410-2641
- Kryriska, E., Kopycinska, D. 2015. *Wages in Labour Market Theories. Folia Oeco-nomica Stetinensia*.
- Kumas, H., Caglar, A., Kataalp. H.S. 2014. *Firm Size and Labour Market Segmen-tation Theory: Evidence from Turkish Micro Data. Procedia – Social and Behaviour Sciences. Vol. 150, Hala-man: 360 – 373*.
- Kurniawan, rony. 2018. *Infrastruktur public menjadi determinasi penting terhadap peningkatan pendapatan perkapita(studi kasus di Kabupaten Ngajuk). Jurnal*
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : Erlangga  
Universitas Diponegoro 2007), H 16
- Mankiw, Gregory. (2006). *Principial Of Economic. Pengantar Ekonomi Makro.Edisi Ketiga. Alih Bahasa Chriswan Sungkono. Jakarta: Salemba Empat*.
- Mangkoesebroto 2001. *Kebijakan ekonomi publik di Indonesia : substansi dan urgensi /Ekonomi Publik - Pembangunan Daerah*
- Metcalf, D. (2008). *Why has the British national minimum wage had little or no impact on employment? Journal of Industrial Relations, 50(3), 489-512*.
- N. Georgy Mankew, Makro Ekonomi, ( Edisi Ke-6, Jakarta: Erlangga, 2006) Hlm. 165
- Norhidayah (2018) Pengaruh Kredit Sektoral terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan 2012-2016

- Prabowo, Azis. 1997. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Subsektor Industri Kecil Di Kabupaten Tegal*, Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang,
- Paul A. Samuelson, Dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi, Alih Bahasa*, (Edisi Ke-17, Jakarta: Pt Media Global Edukasi, 2003) Hlm. 283
- Paul A Samuelson, Dan Wiliam D Nordhaus 2003. *Mikroekonomi Jakarta* : Erlangga
- Rahmawati 2011 *Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Inflasi Di Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Rini Sulistiawati 2012 *Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*
- Retno ayu Wulandari 2014. *Hubungan Kausalitas antara Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di Indonesia periode 1997- 2014*
- Rosen, H. S. (2014). *Public Finance, Tenth Edition, Global Edition. The McGraw-Hill Series in Economics*.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persaja*.
- Sukirno, S. (2013). *Pengantar Teori Makroekonomi. PT. Raja Garfindo Persada*.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada*.
- Siti Syuhada, Aulia Tasman, Hardiani. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Jambi*
- Sadono Sukirno. 2009. *Mikro Ekonomi (Teori Pengantar)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. H 10

Suparta 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur (2007-2016)*

Suparmono 2009 *perbankan dan masalah kredit rineka cipta 2009*

Siska Demi Putri, Ali Anis, Mike Triani (2018) *Pengaruh Ketenagakerjaan, Pengeluaran Pemerintah Dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia pada tahun 1988-2017.*

Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hal. 6

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, (Jakarta:LP3ES,2012), hal.11

Todaro, P Michael. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*.

Edisi ke 9.

Jakarta: Erlangga.

Tri Wahyu Rejekiningsih. *Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil Dalam Perekonomian Di Propinsi Jawa Tengah*. (Semarang : Jurnal Dinamika Pembangunan, 2004) Vol. 1. No. 2.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*

*Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-Dan-Menengah.*

Wahyudi 2012 *Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia (Bi) Dan Produk Domestik Bruto (Pdb) Terhadap Laju Inflasi Periode 2000-2013* Universitas Brawijaya.



Wahyudi 2012 *Pengaruh Ukuran Bank, Bopo, Risiko Kredit, Kinerja Kredit, Dan Kekuatan Pasar Terhadap Net Interest Margin (Studi Perbandingan Pada Bank Persero Dan Bank Asing Periode Tahun 2008-2012)*

Zulkarnain Nasution. 2018. *Analisis Investasi, Pad Dan Jumlah Unit Ukm Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ukm Di Kabupaten Labuhan Batu*

Zamrowi Taufik 2003, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil, Tesis*

Zainal Fathor Rachman Dan Agus Sriyanto (2010) *Analisis Kontribusi Investasi, Kredit Modal Kerja Dan Kredit Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur 2005-2009*

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1 : Rekap Data Variabel

KABUPATEN /KOTA	TAHUN	KREDIT UMUM (X1)	PENGELUARAN PEMERINTAH (X2)	PDRB (Y1)	TENAGA KERJA UMKM (Y2)
Selayar	2010	46,798,800,000	4,471,366,310,000	1,807,290,000,000	15,129
	2011	64,059,375,000	4,131,052,400,000	1,963,830,000,000	15,803
	2012	77,296,282,000	5,013,893,240,000	2,122,810,000,000	6,503
	2013	93,113,427,000	6,328,854,640,000	2,296,370,000,000	5,340
	2014	110,376,200,000	7,174,954,690,000	2,503,350,000,000	6,038
	2015	67,000,000,000	7,320,286,900,000	2,724,400,000,000	8,262
	2016	81,000,000,000	9,397,077,410,000	2,924,720,000,000	10,627
	2017	28,753,729,000	9,218,641,930,000	3,147,390,000,000	9,750
	2018	24,565,805,000	11,344,613,640,000	3,422,670,000,000	8,065
	2019	69,812,530,000	10,757,983,190,000	3,685,670,000,000	4,939
Bulukumba	2010	13,331,350,000	5,397,691,300,000	4,740,630,000,000	2,387
	2011	15,828,720,000	5,267,634,530,000	5,000,760,000,000	3,902
	2012	20,358,640,000	7,584,485,910,000	5,483,240,000,000	4,472
	2013	23,201,790,000	8,635,825,640,000	5,809,240,000,000	5,121
	2014	26,733,310,000	11,567,166,180,000	6,413,700,000,000	5,657
	2015	22,556,339,000	13,387,515,140,000	6,774,320,000,000	5,703
	2016	22,551,073,000	15,233,774,730,000	7,232,840,000,000	6,958
	2017	26,332,429,000	16,230,061,220,000	7,730,910,000,000	6,846
	2018	27,746,031,000	14,460,940,360,000	8,121,330,000,000	5,591
	2019	30,423,050,000	15,141,610,310,000	8,567,460,000,000	11,890
Bantaeng	2010	12,804,500,000	3,800,274,910,000	2,693,300,000,000	9,902
	2011	12,337,800,000	3,727,692,140,000	2,943,290,000,000	6,811
	2012	16,992,859,000	4,613,368,470,000	3,234,460,000,000	1,223
	2013	15,823,510,000	6,135,033,700,000	3,525,610,000,000	2,440
	2014	17,477,180,000	6,312,175,470,000	3,819,280,000,000	2,676
	2015	13,281,111,000	6,835,229,480,000	4,073,060,000,000	3,686
	2016	15,584,190,000	7,753,918,820,000	4,374,210,000,000	4,120
	2017	16,731,550,000	8,992,356,060,000	4,694,160,000,000	6,426
	2018	18,350,520,000	9,481,641,400,000	5,075,840,000,000	7,323
	2019	19,794,890,000	11,026,644,170,000	5,621,520,000,000	8,413
Jeneponto	2010	23,019,826,000	3,965,355,910,000	3,556,090,000,000	4,074
	2011	25,061,019,000	4,606,993,300,000	3,856,300,000,000	4,706
	2012	33,855,224,000	6,593,694,670,000	4,147,460,000,000	3,715
	2013	17,408,990,000	7,215,560,960,000	4,422,900,000,000	3,913
	2014	27,000,065,000	8,232,401,110,000	4,773,640,000,000	4,080
	2015	23,031,222,000	9,659,291,270,000	5,085,920,000,000	4,107
	2016	33,211,153,000	13,173,586,170,000	5,508,830,000,000	4,328
	2017	38,758,489,000	11,605,434,070,000	5,963,560,000,000	6,755
	2018	33,823,923,000	12,352,480,310,000	6,338,740,000,000	5,615
	2019	49,937,269,000	14,029,232,550,000	6,685,620,000,000	6,704

Takalar	2010	17,494,312,000	4,265,277,780,000	3,321,670,000,000	1,677
	2011	17,504,055,000	4,144,504,220,000	3,573,900,000,000	7,674
	2012	18,368,882,000	8,303,171,270,000	3,809,140,000,000	4,203
	2013	17,240,254,000	6,932,692,330,000	4,144,290,000,000	4,450
	2014	22,661,500,000	9,363,861,540,000	4,548,620,000,000	4,660
	2015	27,047,688,000	9,913,064,970,000	4,932,540,000,000	4,761
	2016	17,331,269,000	13,463,425,800,000	5,405,320,000,000	5,018
	2017	32,084,962,000	10,438,676,420,000	5,803,940,000,000	15,960
	2018	29,672,017,000	11,837,657,460,000	6,191,060,000,000	11,031
	2019	36,095,745,000	11,858,160,500,000	6,616,250,000,000	16,411
Gowa	2010	21,470,930,000	6,842,649,890,000	7,132,480,000,000	16,238
	2011	21,549,624,000	6,477,973,120,000	7,664,510,000,000	13,263
	2012	20,733,128,000	10,657,909,560,000	8,289,110,000,000	16,758
	2013	60,515,121,000	10,382,223,210,000	9,707,000,000,000	17,513
	2014	68,090,749,000	14,559,913,140,000	9,720,170,000,000	17,050
	2015	23,589,749,000	13,787,855,230,000	10,380,220,000,000	17,872
	2016	23,589,799,000	17,347,855,230,000	11,166,020,000,000	18,534
	2017	166,566,100,000	15,775,418,600,000	11,971,360,000,000	33,420
	2018	174,556,509,000	19,761,469,220,000	12,825,810,000,000	31,870
	2019	180,454,117,000	19,272,982,480,000	13,783,110,000,000	35,901
Sinjai	2010	42,434,158,000	4,479,219,790,000	3,781,770,000,000	381
	2011	40,640,158,000	4,356,952,730,000	4,069,010,000,000	1,384
	2012	43,656,158,000	6,936,472,860,000	4,366,710,000,000	8,978
	2013	52,232,608,000	6,445,232,300,000	4,706,670,000,000	9,225
	2014	57,068,843,000	8,439,190,180,000	5,035,300,000,000	9,445
	2015	62,248,255,000	9,266,880,860,000	5,415,380,000,000	9,868
	2016	92,652,735,000	12,694,089,040,000	5,799,310,000,000	10,530
	2017	94,846,285,000	11,669,374,060,000	6,218,640,000,000	6,522
	2018	97,229,000,000	11,839,031,540,000	6,681,250,000,000	11,561
	2019	97,250,660,000	13,515,159,450,000	7,090,280,000,000	22,879
Maros	2010	19,457,308,000	4,752,578,700,000	7,315,450,000,000	6,889
	2011	14,569,640,000	4,795,604,890,000	8,137,590,000,000	14,219
	2012	20,008,000,000	7,541,762,550,000	9,044,510,000,000	7,610
	2013	13,484,208,000	9,303,123,570,000	9,612,260,000,000	9,915
	2014	20,595,447,000	10,025,931,540,000	10,066,820,000,000	8,954
	2015	43,711,689,000	11,563,241,260,000	10,916,730,000,000	8,962
	2016	10,476,504,000	14,001,388,220,000	11,954,000,000,000	10,112
	2017	11,590,505,000	12,769,140,660,000	11,768,320,000,000	17,072
	2018	12,671,862,000	14,515,230,030,000	13,558,740,000,000	10,116
	2019	128,716,200,000	14,814,001,100,000	13,726,280,000,000	17,791
Pangkep	2010	22,500,000,000	5,883,085,910,000	8,652,630,000,000	3,412
	2011	22,799,715,000	5,581,844,890,000	9,503,810,000,000	10,647
	2012	24,197,240,000	4,977,424,850,000	10,288,640,000,000	11,430
	2013	12,876,671,000	8,775,404,360,000	11,248,480,000,000	11,919

	2014	20,876,156,000	11,198,657,310,000	12,419,760,000,000	12,745
	2015	36,632,855,000	11,294,571,570,000	13,367,010,000,000	14,322
	2016	61,197,375,000	14,688,203,390,000	14,477,290,000,000	10,047
	2017	128,608,422,000	13,174,026,460,000	15,433,500,000,000	8,072
	2018	131,414,500,000	14,357,208,410,000	16,168,910,000,000	12,794
	2019	155,510,500,000	14,287,459,740,000	17,205,170,000,000	8,724
Barru	2010	8,625,000,000	5,013,219,400,000	2,560,340,000,000	252
	2011	8,928,500,000	4,171,622,330,000	2,760,520,000,000	5,072
	2012	10,500,000,000	12,462,122,520,000	3,000,720,000,000	1,159
	2013	18,785,000,000	6,032,787,780,000	3,237,000,000,000	2,256
	2014	12,565,200,000	7,802,186,600,000	3,474,780,000,000	2,593
	2015	14,473,800,000	8,189,303,720,000	3,694,240,000,000	2,188
	2016	15,311,824,000	11,299,049,690,000	3,916,340,000,000	1,198
	2017	11,796,400,000	11,875,595,800,000	4,169,980,000,000	3,012
	2018	12,550,100,000	11,391,856,510,000	4,466,540,000,000	3,557
	2019	15,812,728,000	10,177,370,090,000	4,797,430,000,000	3,109
Bone	2010	13,033,446,000	8,083,896,820,000	11,055,900,000,000	17,957
	2011	13,451,046,000	7,576,563,140,000	11,763,800,000,000	15,233
	2012	13,507,946,100	6,637,186,230,000	12,730,120,000,000	19,081
	2013	13,876,046,000	14,662,372,860,000	13,531,850,000,000	19,135
	2014	14,208,946,000	16,291,429,520,000	14,421,380,000,000	19,199
	2015	14,527,546,000	18,417,753,110,000	16,051,870,000,000	19,285
	2016	24,770,000,000	22,024,859,420,000	17,498,180,000,000	21,337
	2017	16,399,000,000	23,229,025,410,000	18,970,530,000,000	19,239
	2018	25,504,000,000	23,407,387,600,000	20,660,070,000,000	14,521
	2019	36,605,000,000	23,938,715,160,000	22,108,040,000,000	19,096
Soppeng	2010	36,221,210,000	5,036,780,620,000	3,716,820,000,000	12,641
	2011	37,736,097,000	4,688,097,500,000	3,983,420,000,000	1,399
	2012	38,240,630,000	8,707,966,570,000	4,245,550,000,000	12,970
	2013	41,422,452,000	7,132,413,730,000	4,565,540,000,000	13,717
	2014	41,713,957,000	9,128,149,980,000	4,882,190,000,000	13,227
	2015	45,429,706,000	9,974,594,490,000	5,131,720,000,000	13,276
	2016	50,992,647,000	13,156,029,940,000	5,547,690,000,000	13,323
	2017	53,444,011,000	12,659,103,630,000	6,007,460,000,000	6,040
	2018	63,840,769,000	11,560,954,180,000	6,494,390,000,000	4,573
	2019	73,650,180,000	11,838,086,680,000	6,993,530,000,000	3,769
Wajo	2010	55,247,103,000	6,092,023,480,000	7,520,130,000,000	30,693
	2011	58,390,888,000	5,462,033,140,000	8,280,580,000,000	20,776
	2012	59,629,150,000	6,757,176,570,000	8,819,110,000,000	30,082
	2013	60,471,693,000	10,133,171,170,000	9,428,970,000,000	31,951
	2014	82,386,089,000	12,550,676,830,000	10,341,080,000,000	18,157
	2015	95,340,123,000	12,370,234,060,000	11,071,650,000,000	19,055
	2016	99,731,990,000	16,102,203,650,000	11,620,740,000,000	19,225
	2017	138,786,840,000	14,965,193,390,000	12,225,770,000,000	13,618

	2018	141,654,780,000	14,428,227,550,000	12,357,350,000,000	13,802
	2019	141,989,880,000	16,101,189,260,000	12,858,450,000,000	20,079
Sindrap	2010	17,990,955,000	5,966,784,570,000	4,436,090,000,000	11,876
	2011	18,321,104,000	5,608,758,670,000	4,863,450,000,000	12,308
	2012	18,827,104,000	7,024,982,070,000	5,297,540,000,000	12,811
	2013	35,325,692,000	8,258,743,810,000	5,556,560,000,000	16,018
	2014	23,776,968,000	8,220,058,960,000	6,110,200,000,000	12,969
	2015	60,120,415,000	10,612,798,690,000	6,600,920,000,000	16,364
	2016	70,250,145,000	12,139,204,030,000	7,179,780,000,000	17,527
	2017	61,320,445,000	13,958,424,500,000	7,688,830,000,000	10,483
	2018	72,550,250,000	12,030,183,780,000	8,075,030,000,000	8,139
	2019	98,720,123,000	12,849,248,740,000	8,450,690,000,000	10,604
Pinrang	2010	35,242,400,000	5,352,040,480,000	6,595,390,000,000	1,228
	2011	40,250,200,000	4,860,767,820,000	7,104,140,000,000	9,174
	2012	50,750,500,000	5,586,052,990,000	7,708,900,000,000	15,268
	2013	60,120,545,000	8,049,676,600,000	8,269,610,000,000	16,086
	2014	63,350,115,000	10,625,798,020,000	8,940,480,000,000	16,904
	2015	70,673,125,000	10,432,314,040,000	9,677,330,000,000	17,595
	2016	89,658,017,000	14,221,723,950,000	10,397,110,000,000	17,976
	2017	90,495,086,000	13,698,888,590,000	11,212,620,000,000	5,632
	2018	90,495,086,000	14,251,047,350,000	11,987,440,000,000	6,569
	2019	90,575,625,000	12,782,662,870,000	12,770,080,000,000	8,610
Enrekang	2010	12,386,650,000	4,524,597,320,000	2,605,140,000,000	3,805
	2011	14,664,635,000	4,253,695,020,000	2,815,550,000,000	9,174
	2012	17,298,866,000	6,198,596,400,000	3,021,200,000,000	6,499
	2013	28,316,471,000	6,305,933,570,000	3,197,500,000,000	6,527
	2014	23,843,595,000	7,580,728,950,000	3,389,150,000,000	5,278
	2015	30,032,947,000	8,683,342,860,000	3,623,220,000,000	5,583
	2016	30,405,561,000	11,087,044,330,000	3,899,590,000,000	6,072
	2017	33,735,471,000	10,067,508,350,000	4,166,400,000,000	3,092
	2018	10,708,496,000	10,211,932,680,000	4,302,050,000,000	4,262
	2019	42,464,994,000	10,960,192,420,000	4,535,550,000,000	5,548
Luwu	2010	28,438,884,000	4,632,401,830,000	5,123,990,000,000	1,032
	2011	42,086,435,000	4,712,230,320,000	5,528,310,000,000	2,754
	2012	45,167,645,000	6,322,898,440,000	5,915,100,000,000	1,181
	2013	35,140,786,000	6,554,978,640,000	6,372,700,000,000	2,275
	2014	32,164,700,000	10,442,319,600,000	6,934,030,000,000	2,315
	2015	23,964,215,000	8,343,831,110,000	7,437,420,000,000	1,498
	2016	21,701,600,000	15,504,557,540,000	8,023,370,000,000	1,637
	2017	43,446,905,000	13,542,261,670,000	8,567,870,000,000	7,040
	2018	43,924,238,000	13,573,756,580,000	9,155,580,000,000	9,604
	2019	44,035,348,000	14,809,880,050,000	9,728,970,000,000	10,617
Tanah Toraja	2010	20,390,726,000	4,439,619,230,000	2,387,100,000,000	1,670
	2011	30,850,330,000	4,073,097,420,000	2,572,920,000,000	2,341

	2012	13,802,548,000	6,456,412,300,000	2,793,720,000,000	1,015
	2013	13,822,658,000	7,682,943,060,000	2,994,470,000,000	1,078
	2014	16,858,970,000	8,618,096,310,000	3,198,120,000,000	2,025
	2015	17,584,130,000	11,452,661,650,000	3,417,300,000,000	1,102
	2016	18,038,670,000	11,444,612,380,000	3,666,480,000,000	1,911
	2017	80,249,564,000	12,238,679,890,000	3,940,520,000,000	5,094
	2018	72,500,544,000	11,438,755,460,000	4,251,260,000,000	4,810
	2019	80,650,350,000	12,900,000,000,000	4,558,140,000,000	4,390
Luwu Utara	2010	10,525,000,000	4,790,432,180,000	4,255,590,000,000	3,833
	2011	11,011,500,000	4,606,642,540,000	4,597,710,000,000	3,596
	2012	11,373,026,000	6,932,101,300,000	4,911,000,000,000	6,511
	2013	12,073,026,000	7,443,584,460,000	5,274,160,000,000	6,622
	2014	23,164,700,000	12,670,335,820,000	5,739,510,000,000	7,217
	2015	23,964,200,000	11,859,579,530,000	6,122,220,000,000	7,636
	2016	31,256,000,000	12,148,715,760,000	6,580,900,000,000	8,087
	2017	43,461,593,000	12,491,457,580,000	7,081,170,000,000	10,163
	2018	43,933,046,000	13,032,422,130,000	7,675,200,000,000	6,763
	2019	45,033,046,000	13,899,217,150,000	8,221,200,000,000	7,019
Luwu Timur	2010	13,904,529,000	7,259,986,750,000	11,834,160,000,000	564
	2011	14,935,549,000	4,773,996,870,000	11,326,590,000,000	1,775
	2012	16,476,412,000	7,308,430,210,000	11,963,260,000,000	312
	2013	16,450,712,000	7,837,627,160,000	12,717,280,000,000	1,231
	2014	11,073,671,000	10,214,880,230,000	13,748,020,000,000	2,216
	2015	12,290,281,000	10,784,363,970,000	14,631,060,000,000	3,550
	2016	62,328,761,000	14,135,490,590,000	14,862,310,000,000	3,600
	2017	63,562,614,000	15,212,367,950,000	15,318,720,000,000	2,520
	2018	69,196,009,000	15,711,143,750,000	15,837,800,000,000	6,387
	2019	70,251,766,000	16,322,747,790,000	16,022,950,000,000	5,368
Toraja Utara	2010	13,873,708,000	1,796,776,510,000	2,505,710,000,000	650
	2011	15,044,633,000	1,785,276,510,000	2,715,130,000,000	2,731
	2012	15,165,791,000	5,262,159,020,000	2,971,710,000,000	1,015
	2013	13,463,055,000	6,050,183,780,000	3,261,130,000,000	1,093
	2014	10,560,550,000	7,512,713,040,000	3,510,360,000,000	1,025
	2015	12,746,215,000	8,089,256,370,000	3,782,800,000,000	2,102
	2016	13,319,326,000	8,940,764,870,000	4,085,690,000,000	1,991
	2017	12,767,640,000	9,474,382,980,000	4,421,860,000,000	6,095
	2018	10,118,284,000	10,733,571,290,000	4,778,530,000,000	4,271
	2019	18,150,740,000	11,201,112,050,000	5,140,010,000,000	6,787
Makassar	2010	27,657,618,000	12,410,432,670,000	58,556,470,000,000	33,765
	2011	35,289,087,000	12,083,100,100,000	65,622,100,000,000	35,716
	2012	45,459,119,000	20,941,894,870,000	70,851,040,000,000	35,095
	2013	51,176,690,000	20,267,377,620,000	76,907,410,000,000	36,242
	2014	57,202,228,000	33,363,679,140,000	82,592,820,000,000	36,327
	2015	65,937,699,000	30,622,743,940,000	88,828,150,000,000	38,364

	2016	68,369,189,000	36,913,854,840,000	95,957,640,000,000	41,861
	2017	72,660,576,000	34,514,735,880,000	103,826,160,000,000	33,013
	2018	73,926,608,000	37,008,380,380,000	112,568,410,000,000	11,075
	2019	80,719,911,000	43,149,529,840,000	122,465,830,000,000	14,549
Pare-pare	2010	35,471,313,000	3,918,938,130,000	2,670,530,000,000	3,225
	2011	36,909,369,000	3,677,640,030,000	2,895,480,000,000	3,579
	2012	44,459,748,000	5,524,116,910,000	3,150,260,000,000	4,341
	2013	24,556,994,000	6,390,199,450,000	3,400,550,000,000	6,303
	2014	27,527,459,000	7,410,665,600,000	3,615,900,000,000	6,340
	2015	48,958,119,000	7,833,810,990,000	3,843,720,000,000	5,403
	2016	53,992,052,000	10,756,912,970,000	4,107,810,000,000	4,522
	2017	66,620,341,000	9,894,853,770,000	4,394,320,000,000	3,565
	2018	67,058,352,000	8,247,167,290,000	4,639,400,000,000	3,645
	2019	84,447,372,000	9,478,392,180,000	4,947,790,000,000	4,727
Palopo	2010	17,791,477,000	3,860,560,340,000	2,913,050,000,000	1,611
	2011	19,962,874,000	3,949,147,160,000	3,143,190,000,000	2,517
	2012	18,660,317,000	4,891,683,040,000	3,363,250,000,000	11,050
	2013	16,450,067,000	5,577,001,820,000	3,633,010,000,000	12,683
	2014	23,550,000,000	7,467,814,970,000	3,889,240,000,000	13,293
	2015	25,012,345,000	7,619,740,810,000	4,140,870,000,000	14,920
	2016	37,579,200,000	11,156,283,370,000	4,428,500,000,000	13,381
	2017	37,690,025,000	9,952,636,590,000	4,745,900,000,000	14,129
	2018	38,320,252,000	10,026,285,000,000	5,102,990,000,000	10,711
	2019	39,845,312,000	10,141,460,590,000	5,447,350,000,000	4,186



**LAMPIRAN 2: Estimasi Data****Estimates (Group number 1 - Default model)****Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)****Maximum Likelihood Estimates****Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
y1 <--- x1	-59,3905164092	20,6248781043	-2,8795572080	,0039823404	
y1 <--- x2	2,4206304418	,1159035831	20,8848628894	***	
y2 <--- y1	,0000000002	,0000000000	5,8320906147	***	
y2 <--- x1	,0000000707	,0000000127	5,5596943864	***	
y2 <--- x2	,0000000001	,0000000001	,6313044619	,5278414701	

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
x1	1080013607437140000 000,0000000000	98797345188587100000,00000 00000	10,931605 5545	** *	
x2	3419938402196590000 0000000,0000000000	31284868312660300000000000, 0000000000	10,931605 5545	** *	
e1	1098019136802770000 00000000,0000000000	1004444526766680000000000 0,0000000000	10,931605 5545	** *	
e2	40309871,2737336000	3687461,1942983000	10,931605 5545	** *	

**Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate
y1	,6503135059
y2	,3606371236

**Matrices (Group number 1 - Default model)****Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	x2	x1	y1
y1	2,4206304418	-59,3905164092	,0000000000
y2	,0000000006	,0000000571	,0000000002

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	x2	x1	y1
y1	2,4206304418	-59,3905164092	,0000000000
y2	,0000000001	,0000000707	,0000000002

**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	x2	x1	y1
y1	,0000000000	,0000000000	,0000000000
y2	,0000000006	-,0000000136	,0000000000